

MONITORING & EVALUASI IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA, 2003



DR. I MADE SUWANDI, MSoc.Sc.
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri

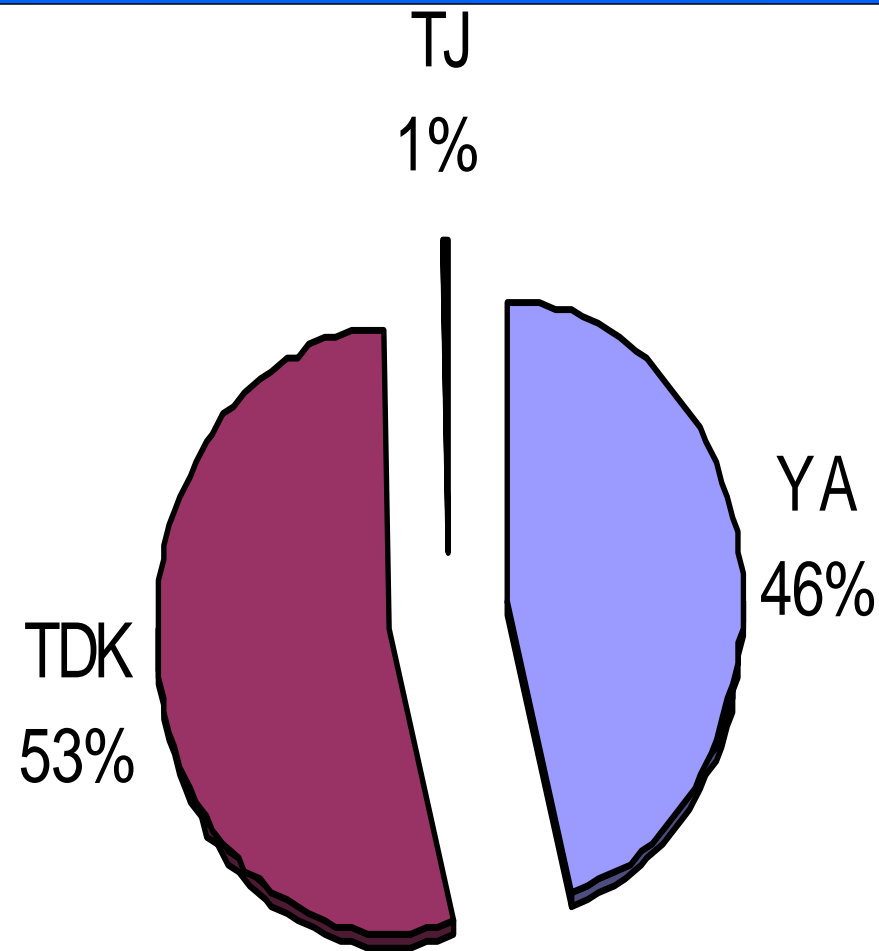
ASPEK YANG DIMONITOR

- 1. KEWENANGAN DAERAH**
- 2. KELEMBAGAAN DAERAH**
- 3. KEPEGAWAIAN DAERAH**
- 4. KEUANGAN DAERAH**
- 5. PERWAKILAN**
- 6. PELAYANAN PUBLIK**
- 7. PENGAWASAN**

KEWENANGAN



ADAKAH KEWENANGAN YANG TUMPANG TINDIH ANTARA KAB/KOT VS PROV. ?



N=278

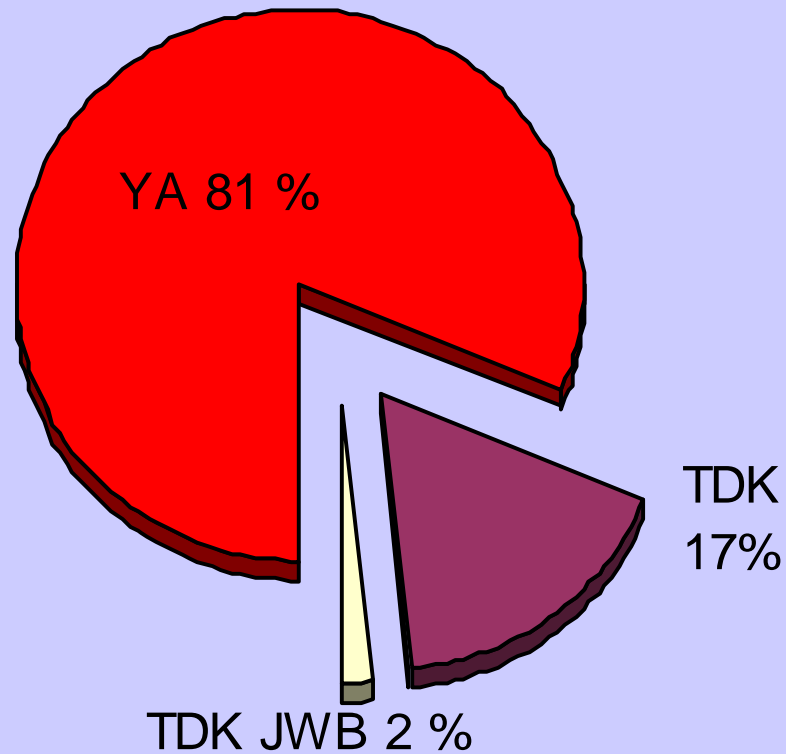
Lanjutan kewenangan yang tumpang tindih :

- Statistik
- Naker/Kepeg
- Pertambangan
- Pendidikan
- Perikanan
- Kelautan
- Metrologi
- AMDAL
- SIUP/IMB
- Parawisata
- Kebudayaan
- Perdagangan

Sumber Tumpang Tindih Kewenangan Kab/Kota Vs Propinsi:

1. UU 22/99 Ps.7 (2) 2%
2. Permenkes No.120/1998 1%
3. Kepres 62/2000 1%
4. PP No.69/2001 1%
5. UU No.25/1999 1%
6. PP 62/1998 1%
7. UU No.21/2001 1%
8. UU No.2/1981 1%
9. UU No.43/2001 1%
10. Kepmenperindag No.107/1998 1%
11. Surat Sekjen Diknas No.088907/2001 1%
12. Permenkes 514/1994 1%
13. PP No.70/2001 1%
14. SE Menhub No.27/2001 1%
15. Kepmenperindag 71/MPR/KEP/10/02 1%
16. Kepmenaker. No.01/1997 1%
17. SK. Menhut No.0652/1996 1%
18. SK Menhut No.594/1996 1%
19. PP No.43/1993 1%
20. PP No.42/1993 1%
21. Kepres No.41/1996 1%
22. Kepres No.64/200 1%
23. PP No.25/2000 3 (4) 1%
24. UU No.8/1999 1%
25. UU No.22/1999 87 (1) 1%
26. UU. No.22/1999 9 (2) 1%

ADAKAH KEWENANGAN DAERAH YANG MASIH DILAKSANAKAN PUSAT ? (N=278)



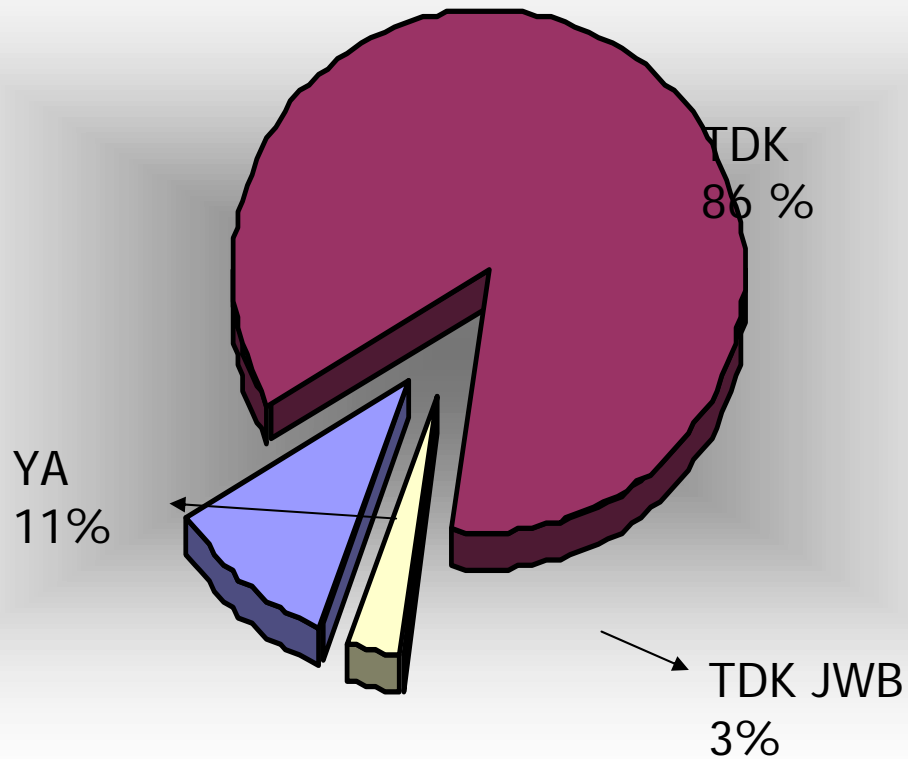
LANJUTAN KEWENANGAN YANG MASIH DILAKSANAKAN PUSAT :

- Statistik
- Naker/Kepeg
- Pertambangan
- Pendidikan
- Perikanan
- Kelautan
- Metrologi
- AMDAL
- SIUP/IMB
- Parawisata
- Kebudayaan
- Perdagangan

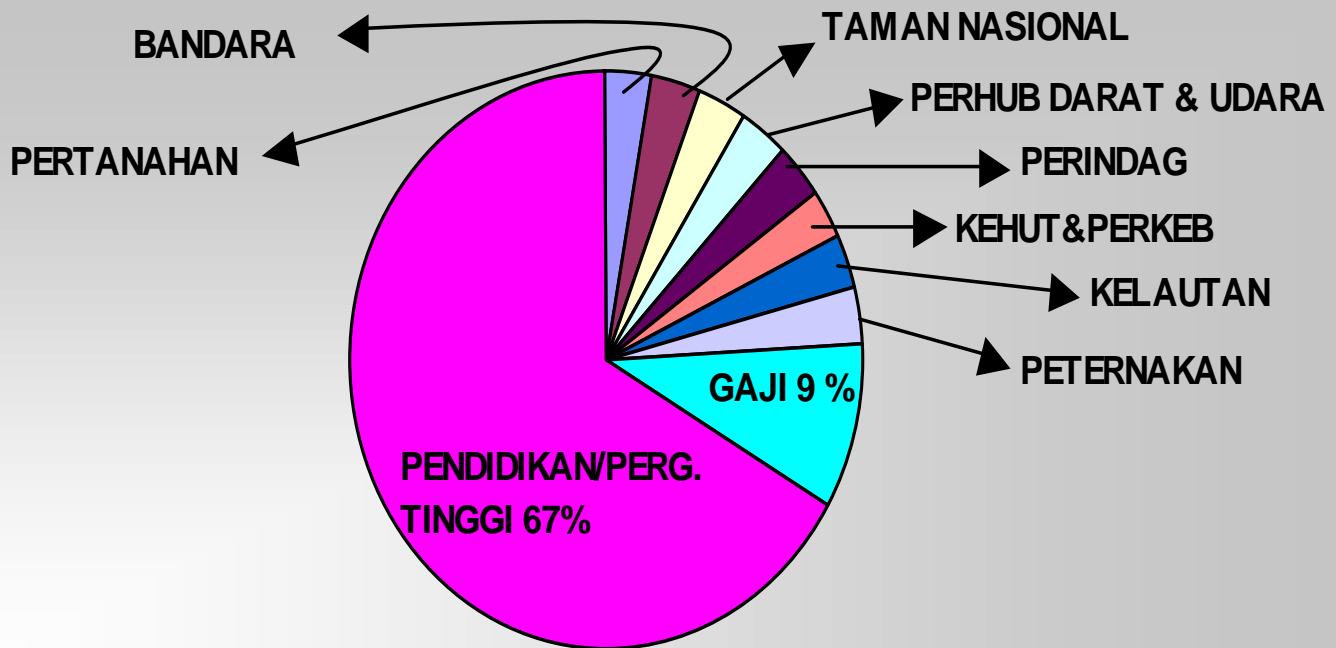
Lanjutan :

1. Keppres 69/01, 166/00, 42/01, 95/00, 3/02, 70/01, 28/85
2. PP 10/01, 18/94, 62/01, 69/01, 14/00
3. 55 5/60
4. Kepmenhut 541/KPTS-II/02
5. UU 16/97, 5/92, 34/00
6. Perda
7. Kep.Bupati/Walkot
8. Kepmendagri 50/00.
9. Kepmen LH 40/00
10. Kepmenperindag 360/MPP/KEP/10/97
11. SRT Mendagri 161/1996/SJ
12. SE Menhut 2038/MENHUT/I/01
13. Kepmendiknas 063/U/95
14. SK Menhut 05.1/KPTS-II/02
15. SKB Mendagri, Kapolri, Menhub Ttg.SIM

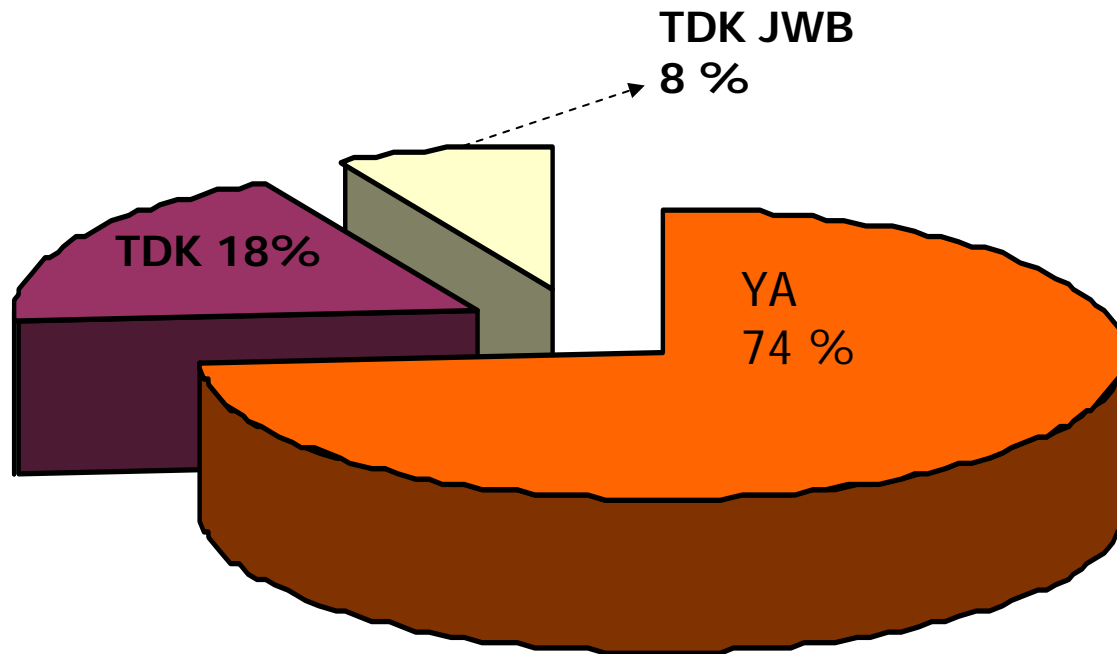
APAKAH ADA KEWENANGAN KAB/KOTA YANG DIKEMBALIKAN KE PUSAT (N=278)



KEWENANGAN YANG DIKEMBALIKAN KE PUSAT



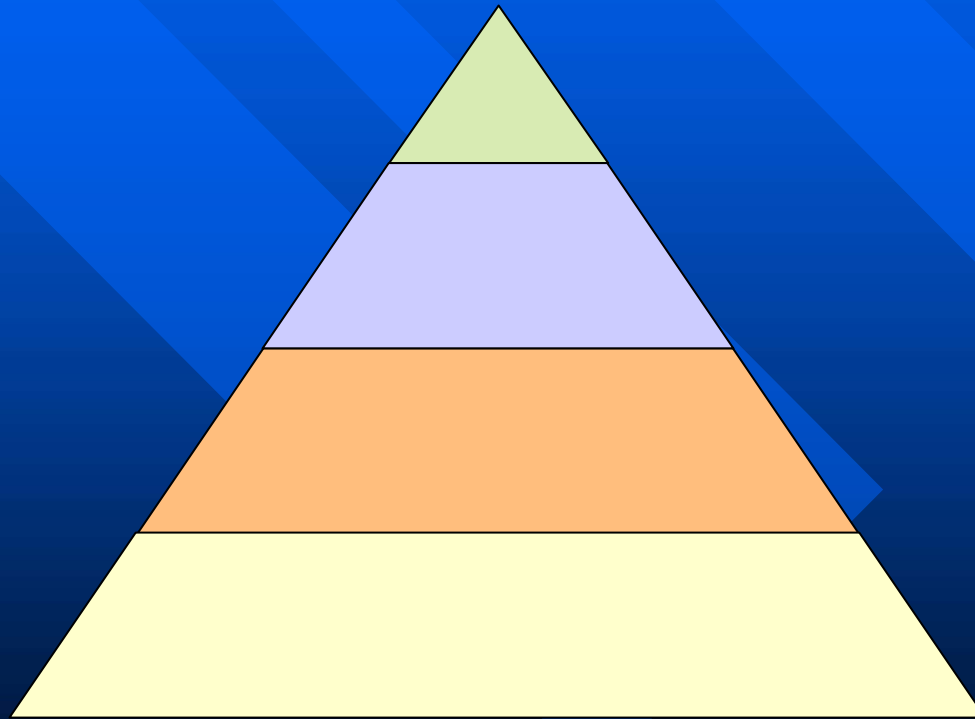
APAKAH TUGAS PEMBANTUAN DAPAT DIPAHAMI DENGAN JELAS ?



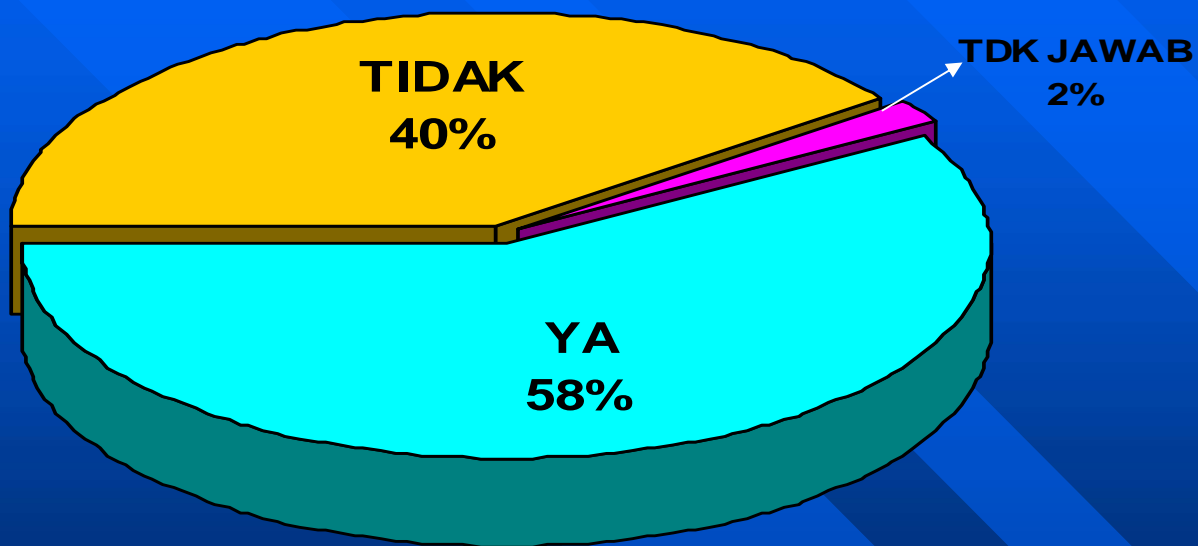
Tugas Pembantuan (lanjutan)

- Pekerjaan Umum
- Perencanaan Nasional
- Agama
- Kantor Penghubung
- Peradilan
- Cagar Budaya
- Narkoba
- Pol. PP
- Statistik/BPS
- Air Bersih
- Komunikasi
- Lingkungan Hidup

KELEMBAGAAAN

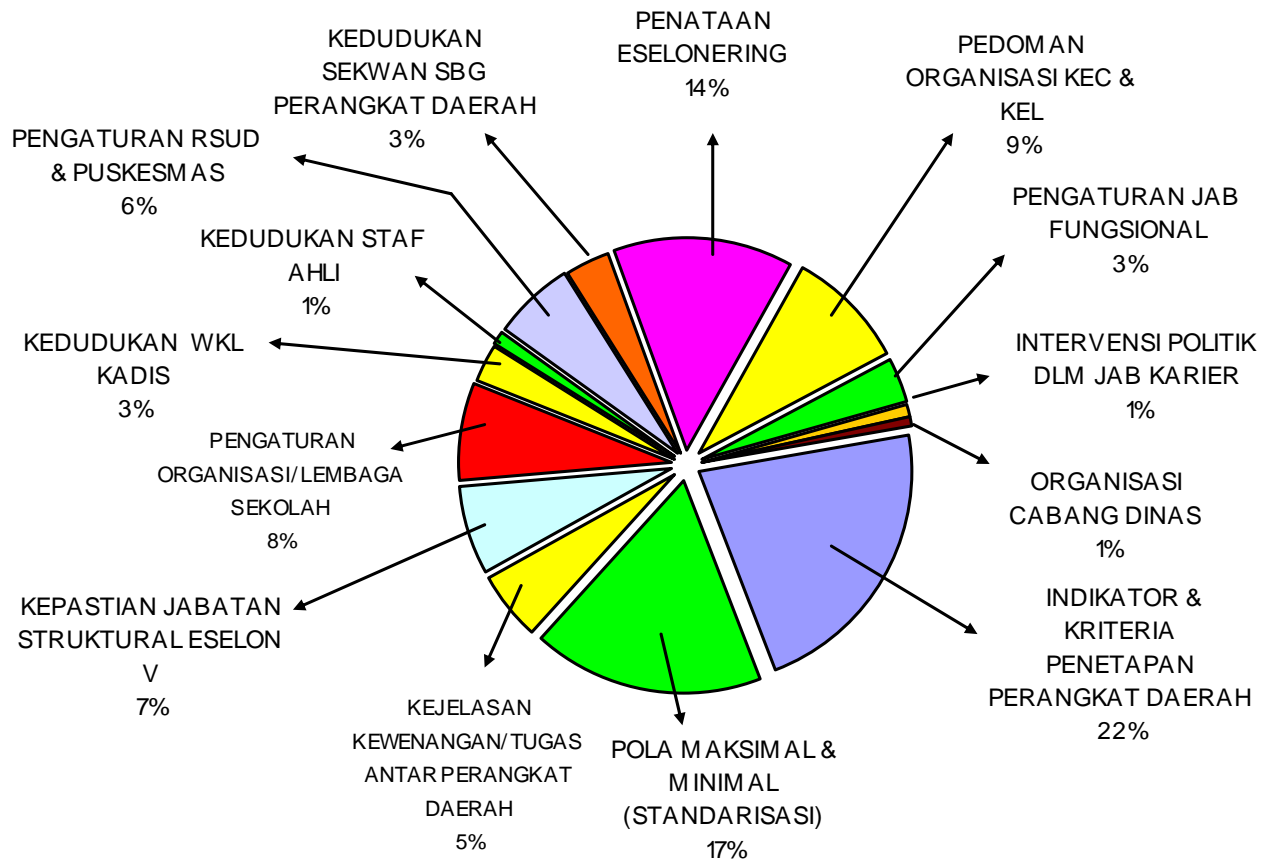


APAKAH PP 84/2000 TELAH MEMBERIKAN ARAHAN YANG JELAS

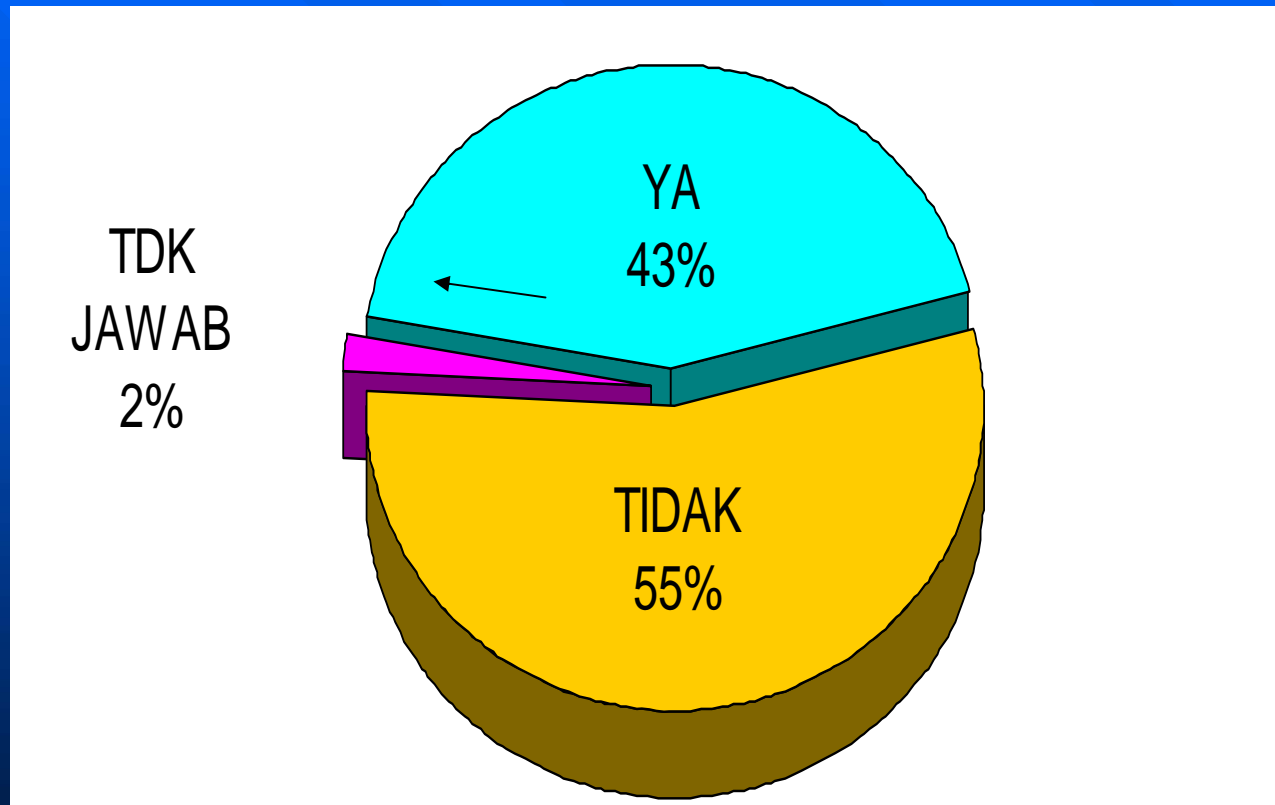


N = 278

KETENTUAN YANG TIDAK JELAS DALAM PP 84/2000

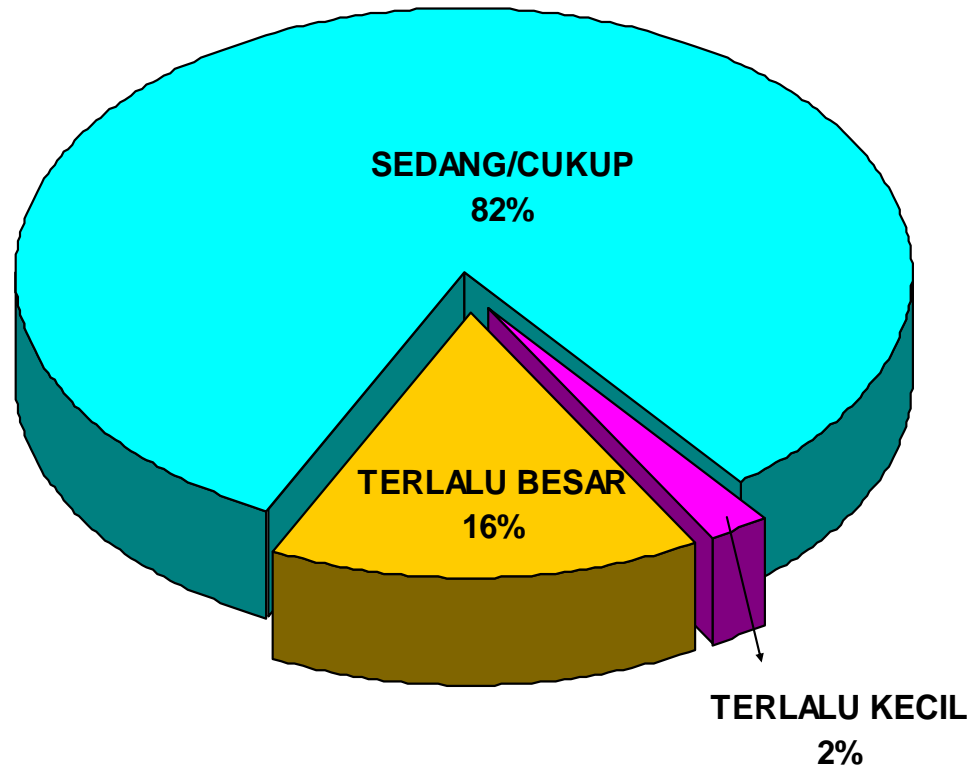


PERLUKAH KESERAGAMAN NOMENKLATUR SOTK PEMDA



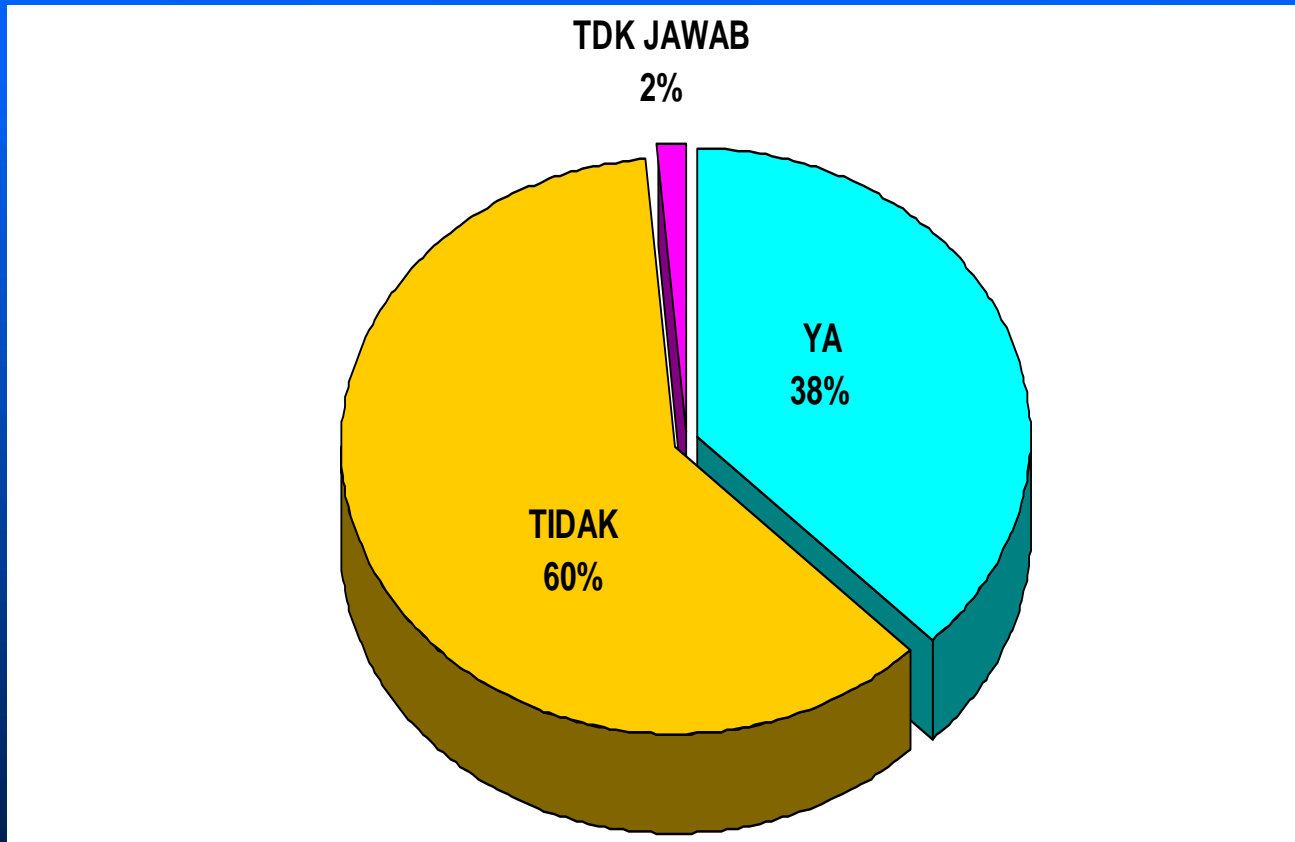
N = 278

PENILAIAN TERHADAP SOTK YANG ADA



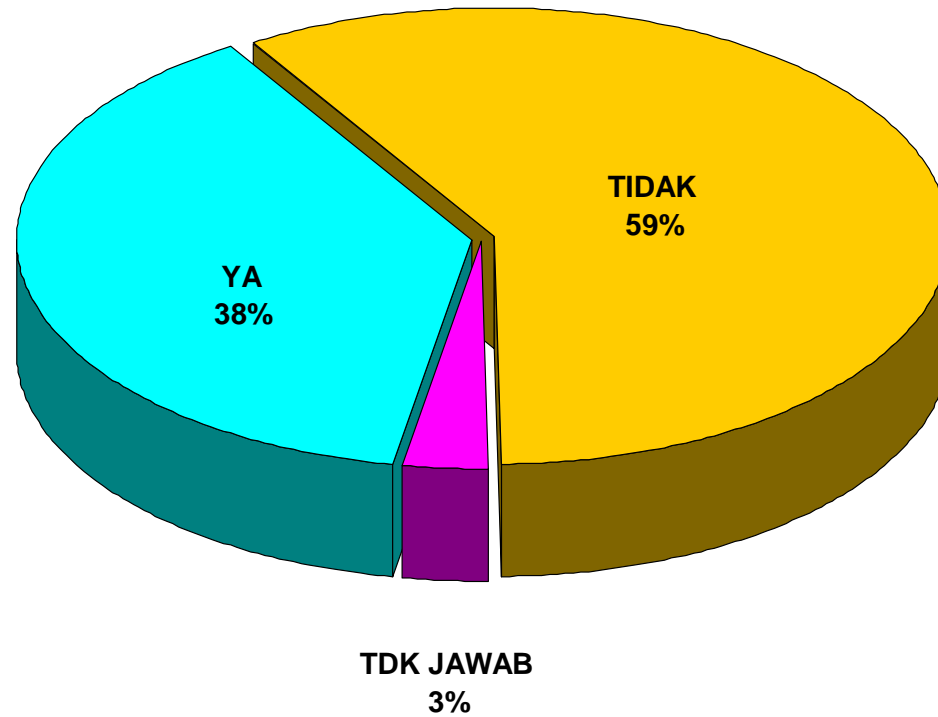
N = 278

APAKAH PENGGABUNGAN KANDEP MEMBUAT SOTK PEMDA JADI BESAR



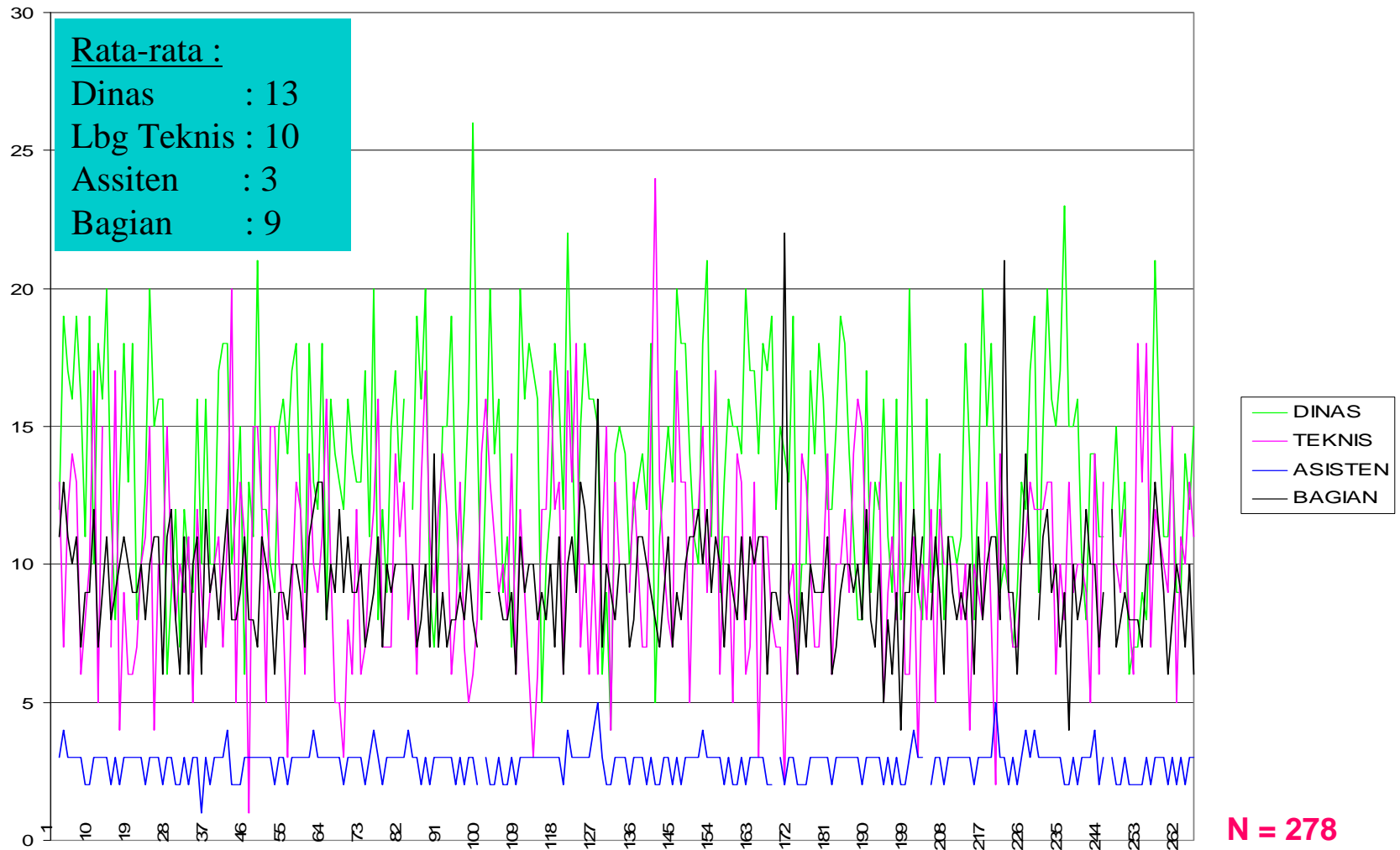
N = 278

APAKAH PENINGKATAN ESELONERING JADI BEBAN BIAYA BAGI PEMDA



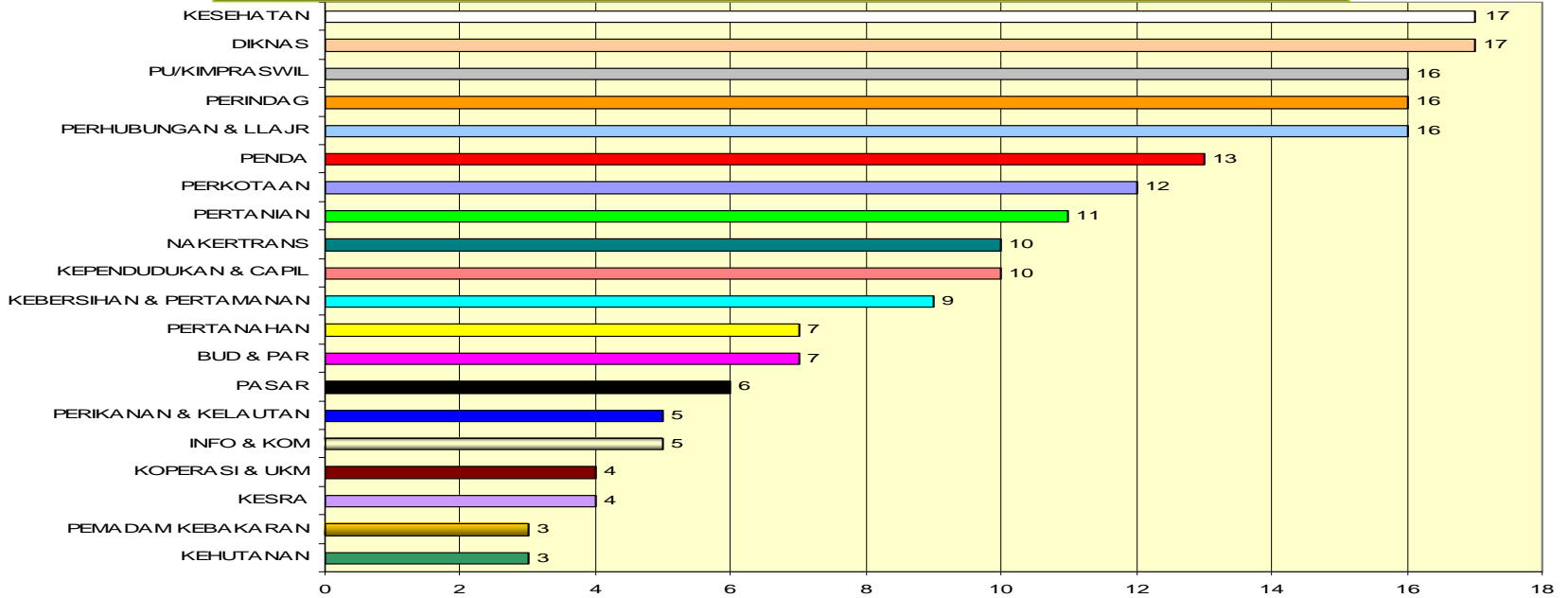
N = 278

JUMLAH DINAS, TEKNIS, ASISTEN & BAGIAN

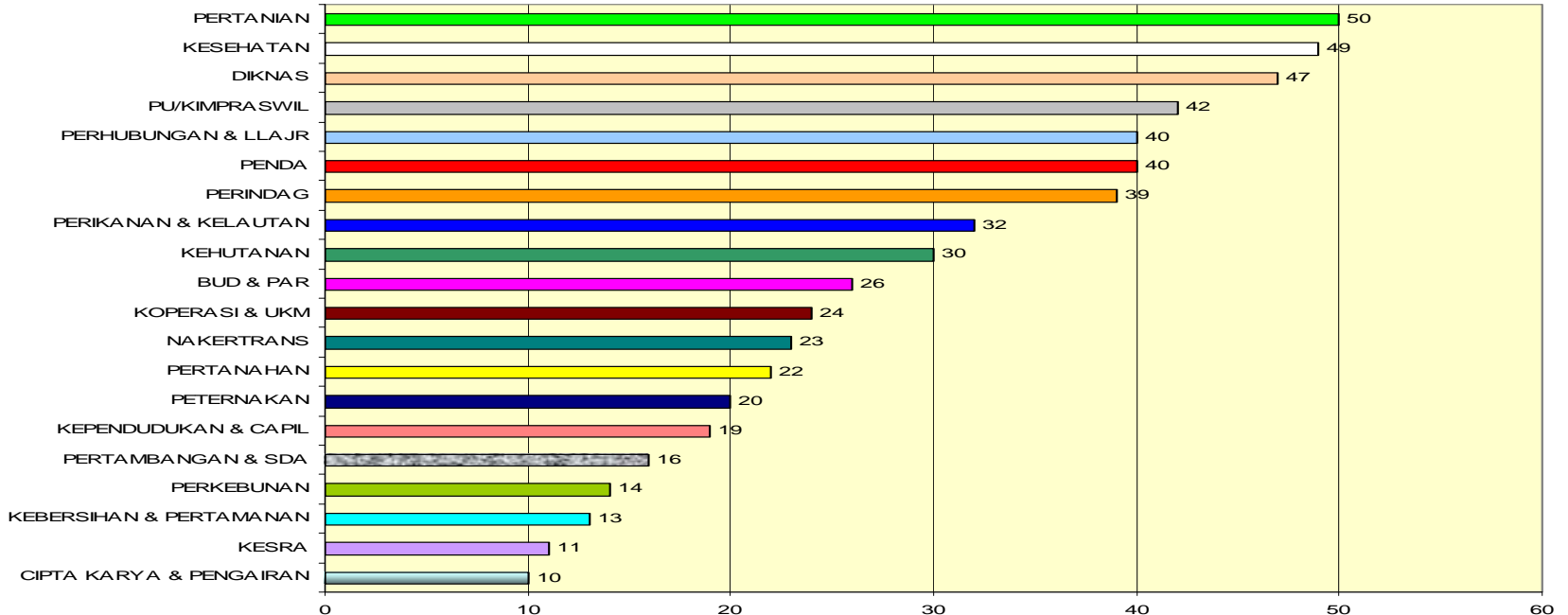


NAMA DINAS YG PADA UMUMNYA ADA

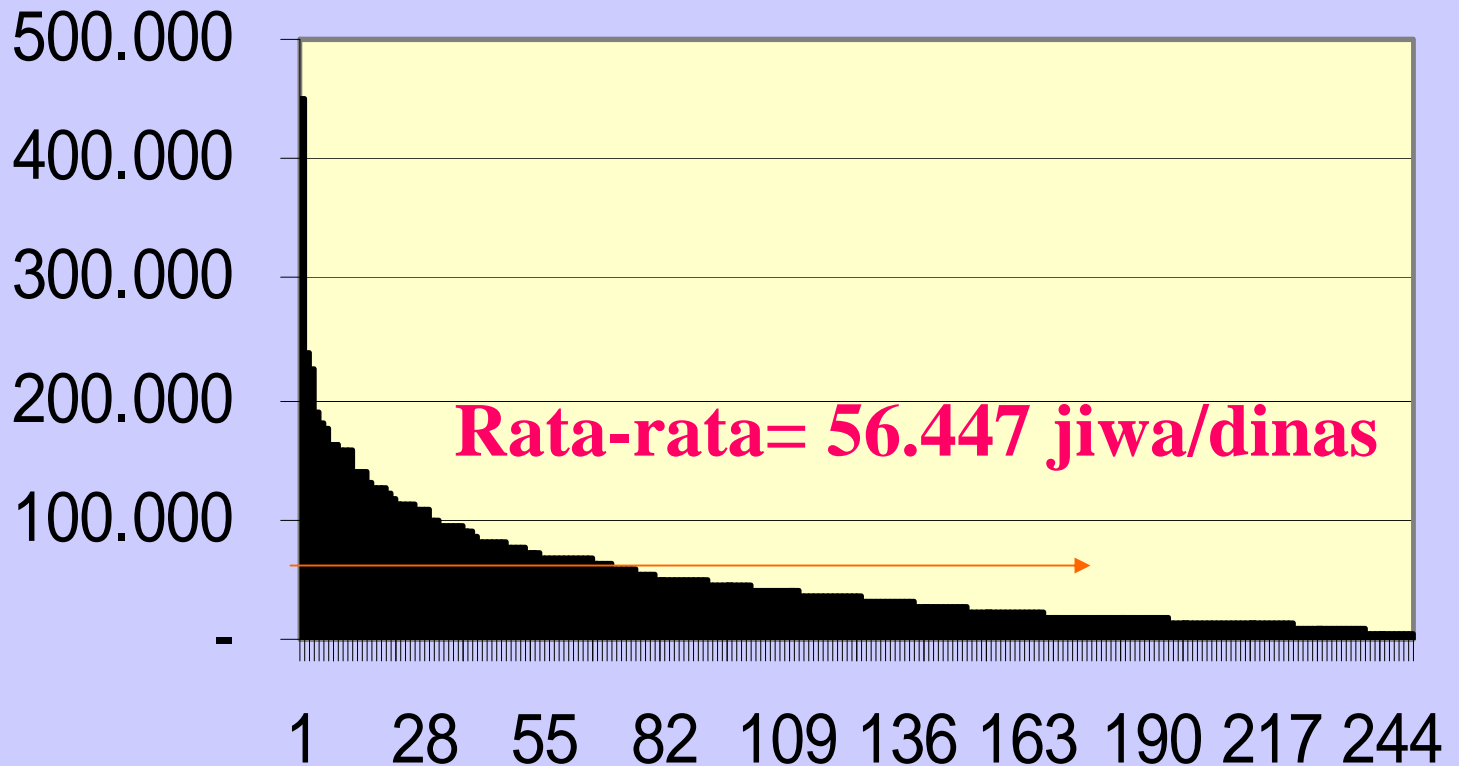
KOTA



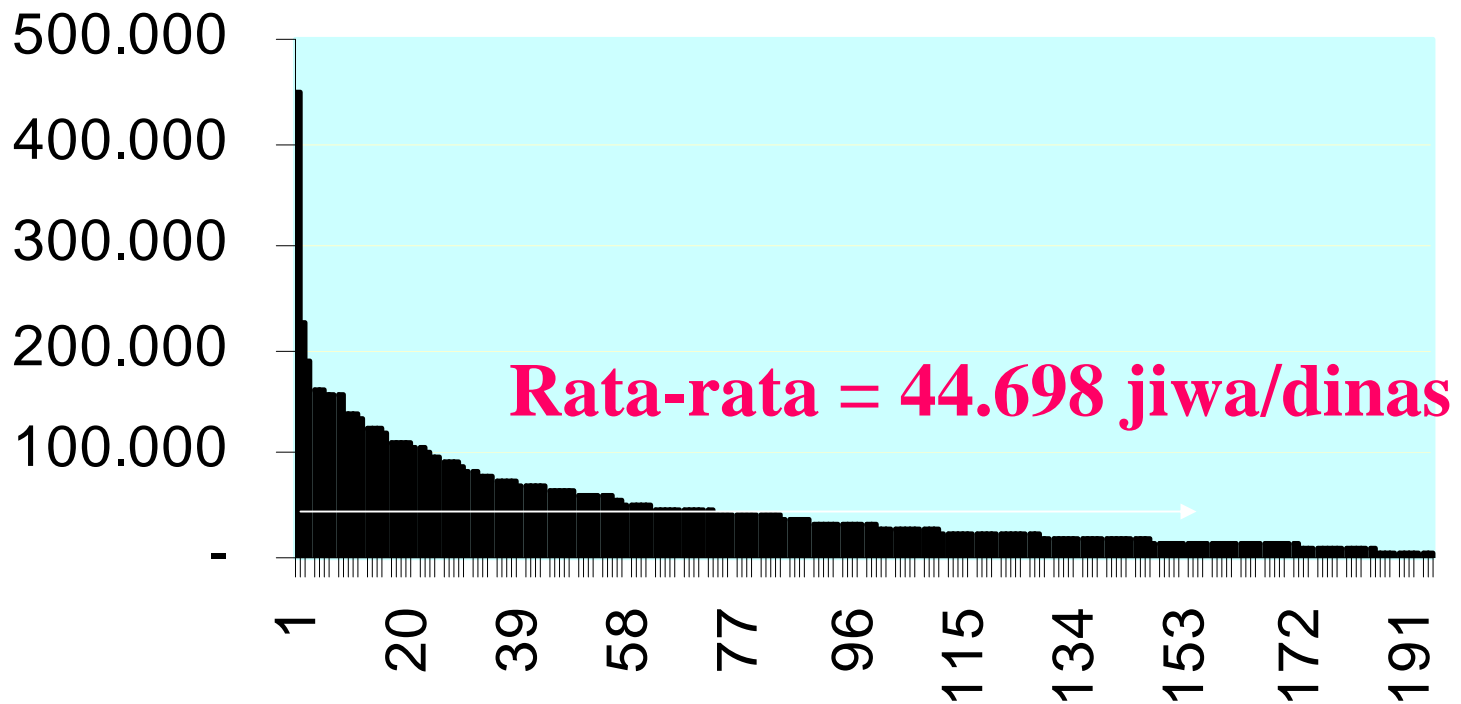
KABUPATEN



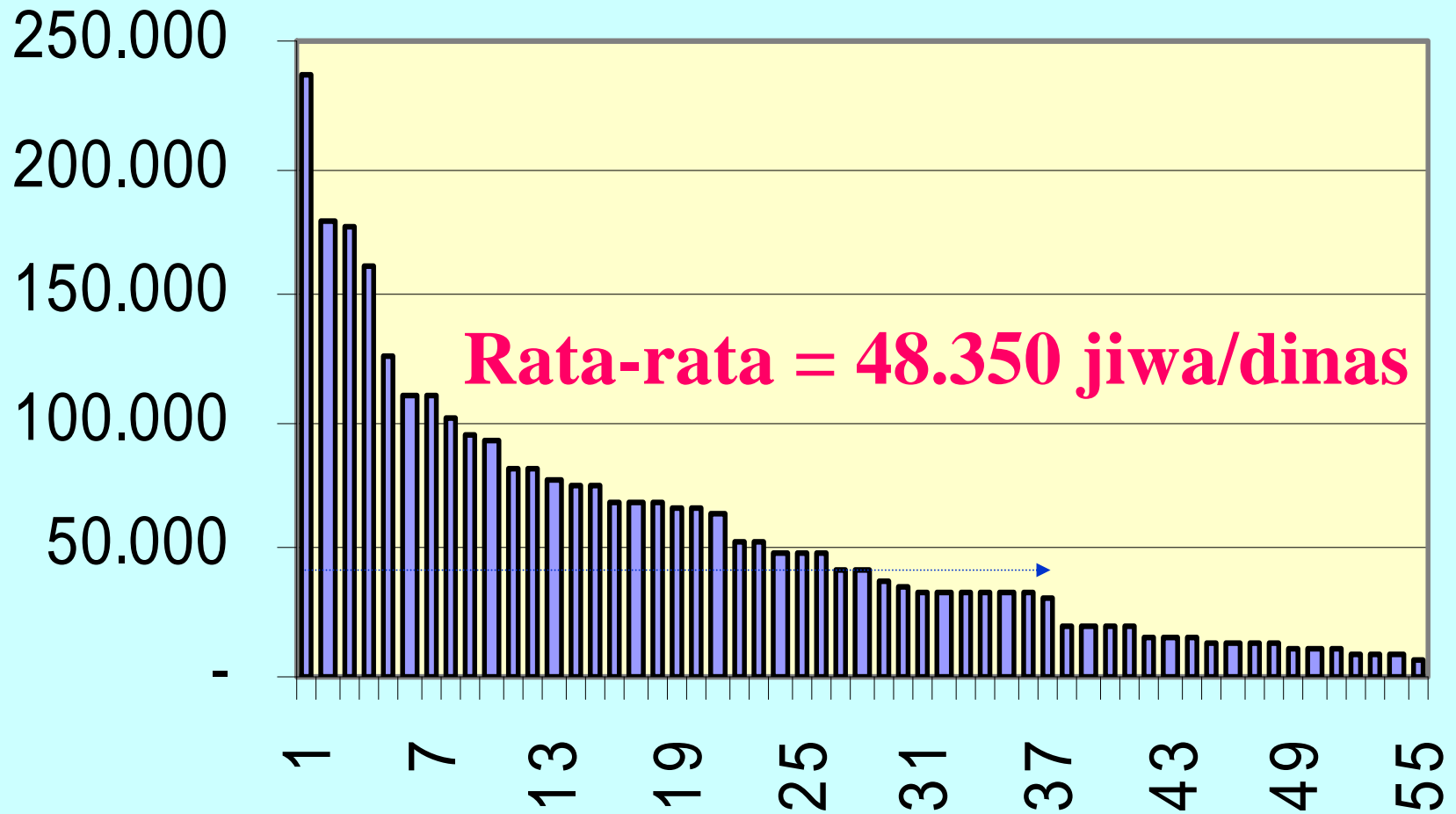
Rasio Dinas/Populasi (N=278)



Rasio Dinas Kab/Populasi(N=219)



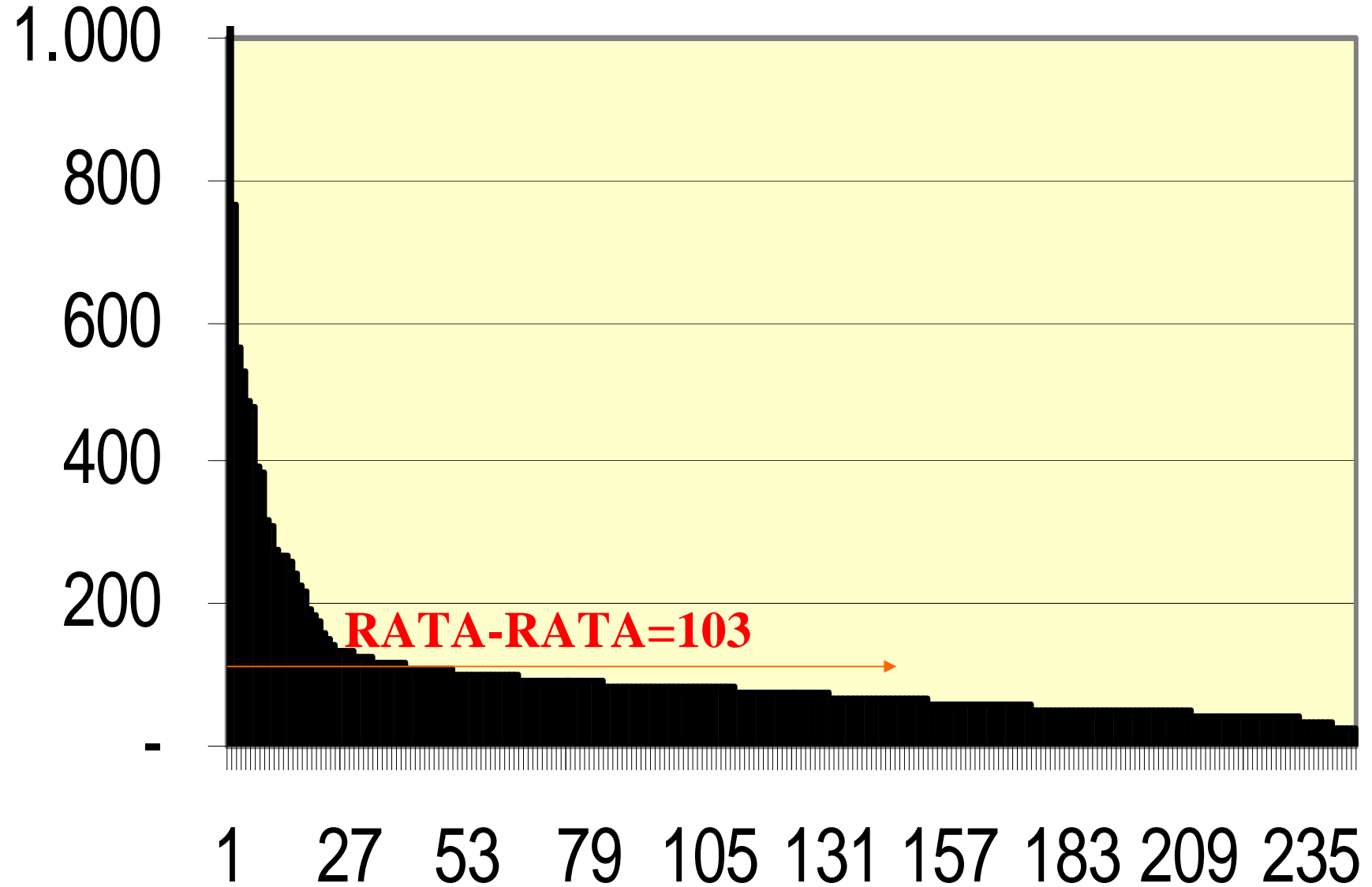
Rasio Dinas Kota/Populasi (N=59)



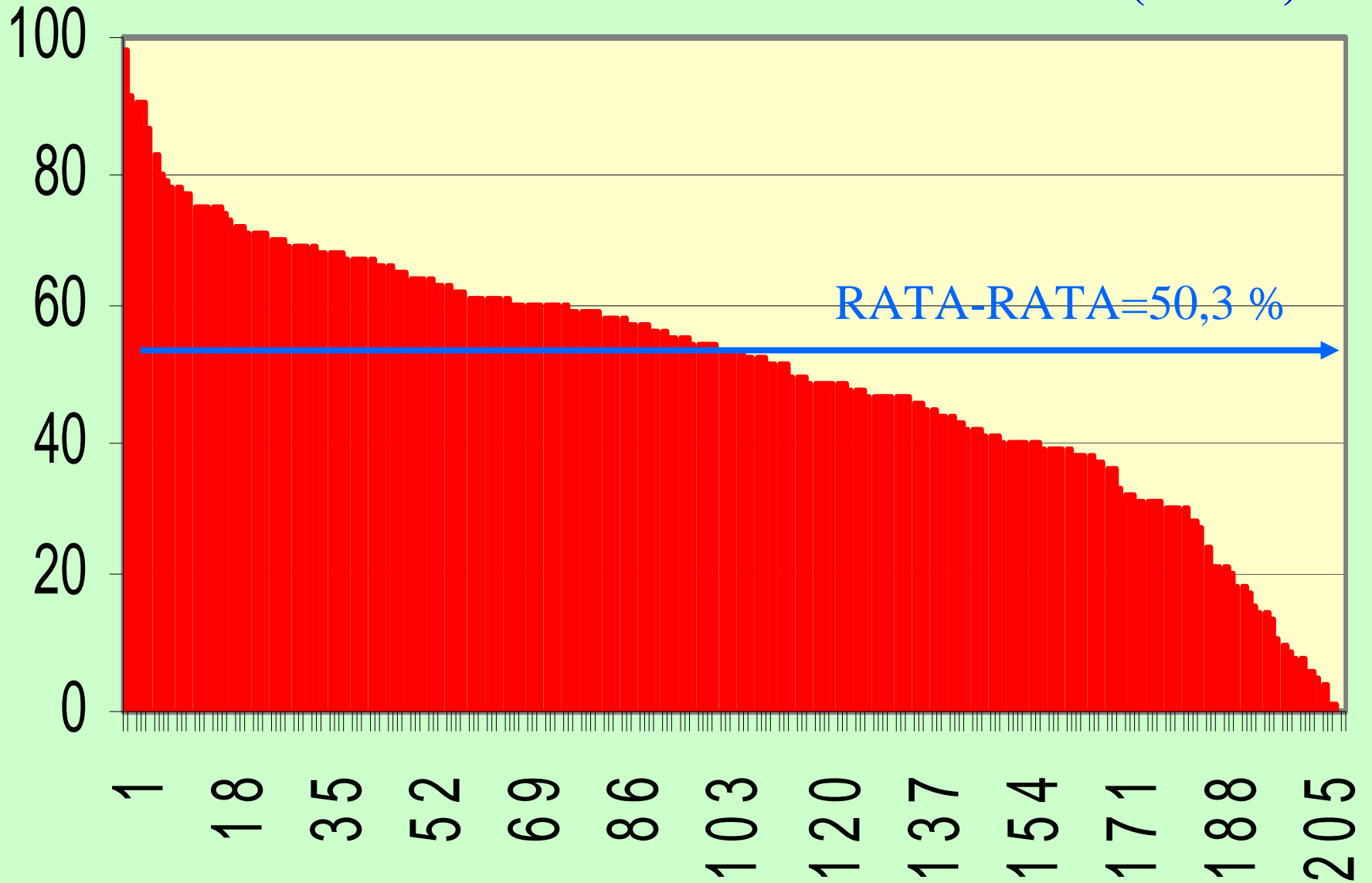
KEPEGAWAIAN



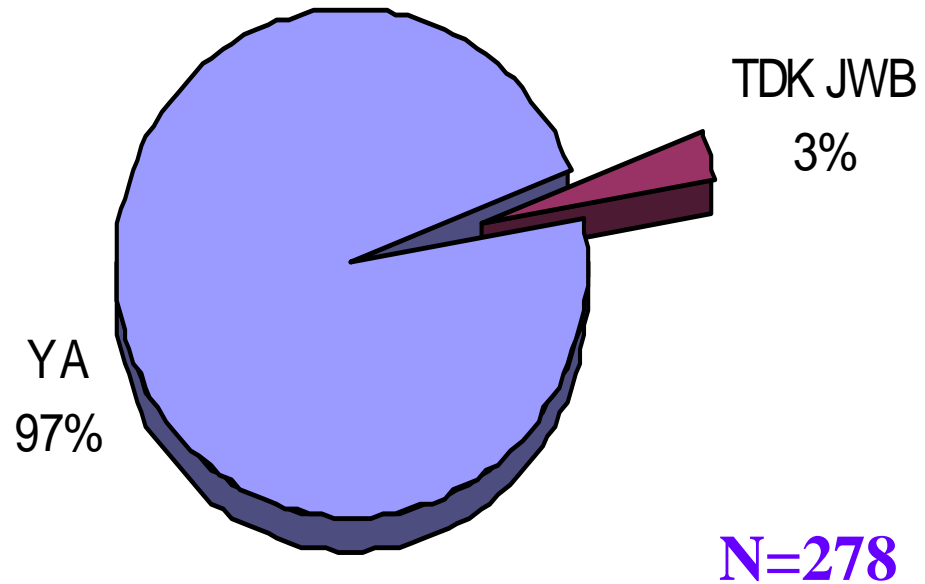
RASIO POPULASI/PERSONIL (N=255)



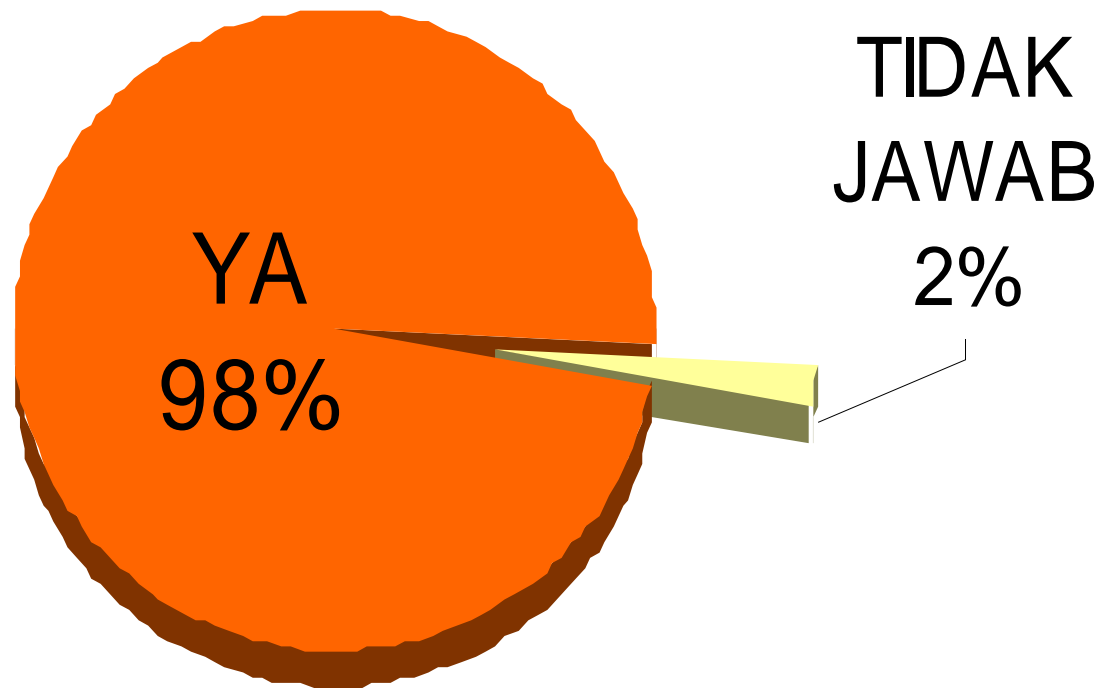
PROSENTASE BIAYA PERSONIL THD APBD (N=220)



APAKAH TERJADI MUTASI PNS DARI DAN KE DAERAH SAUDARA

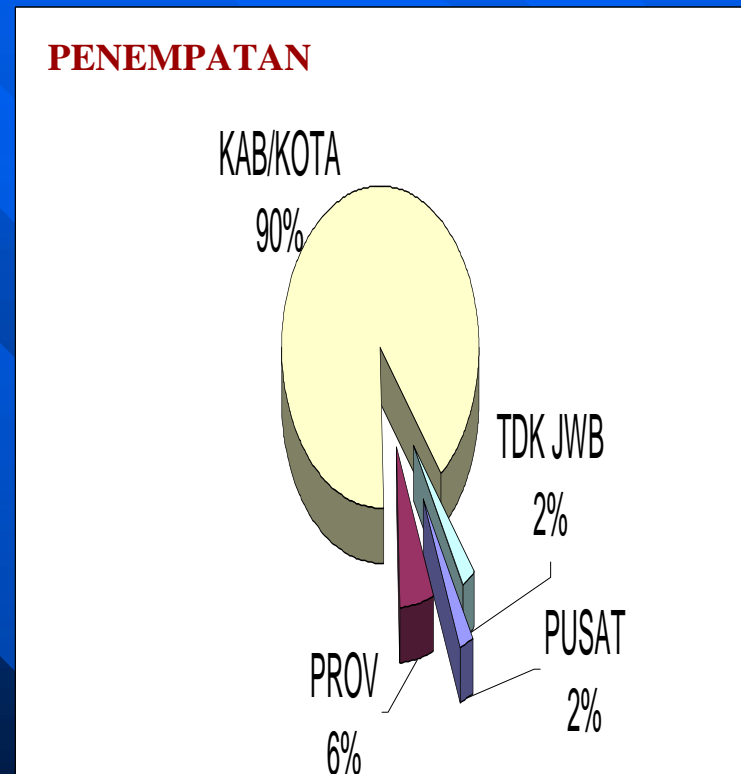
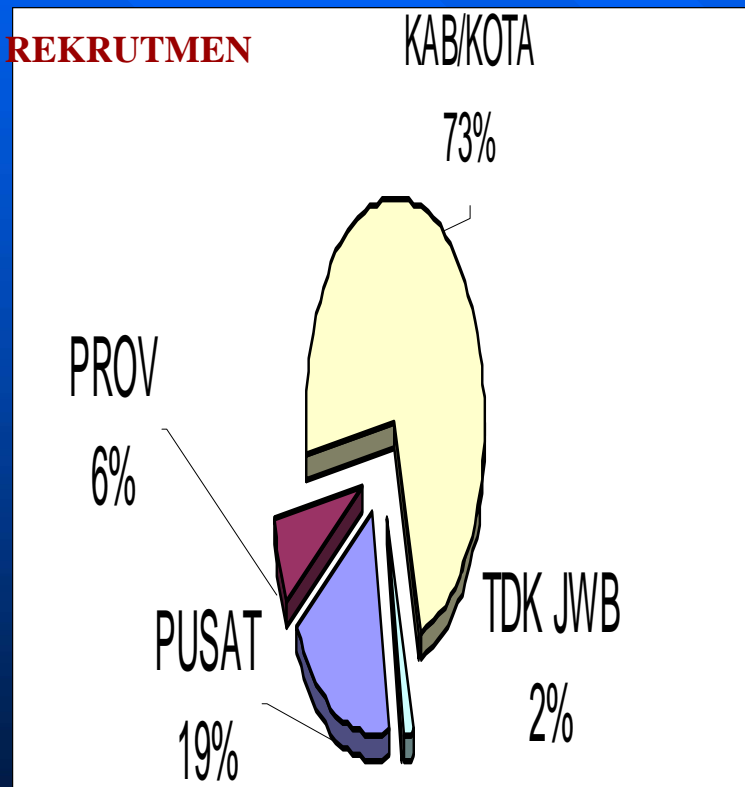


APAKAH KETENTUAN TTG MUTASI (PP 96/2000) DAPAT DILAKSANAKAN



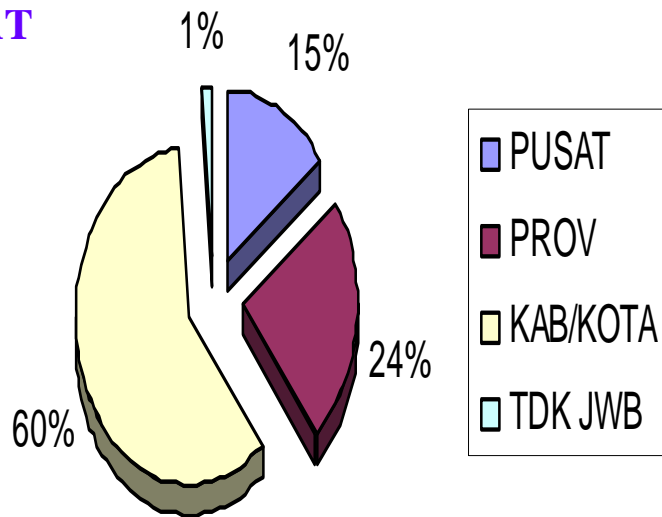
N=278

**MENURUT SDR,SIAPA YG BERWENANG MENGELOLA
KEPEGAWAIAN MENURUT ASPEK BERIKUT INI ?
(N=278)**

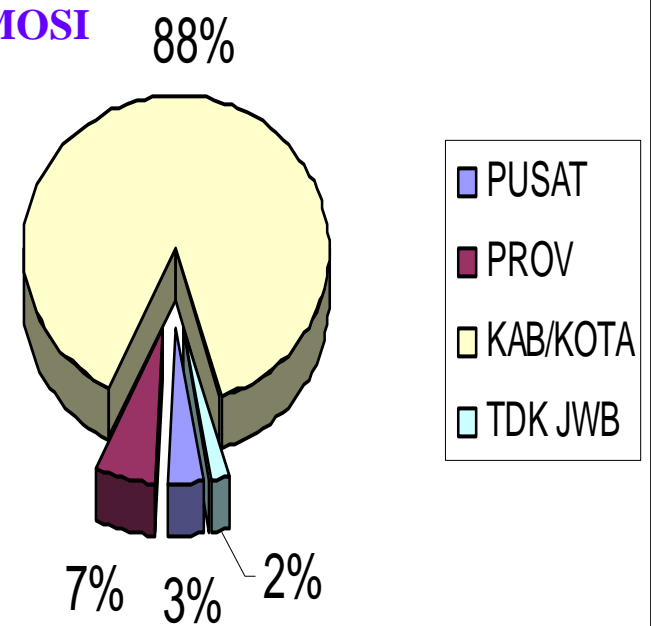


MENURUT SDR,SIAPA YG BERWENANG MENGELOLA KEPEG.DAERAH UNTUK ASPEK BERIKUT INI ?(N=278)

DIKLAT

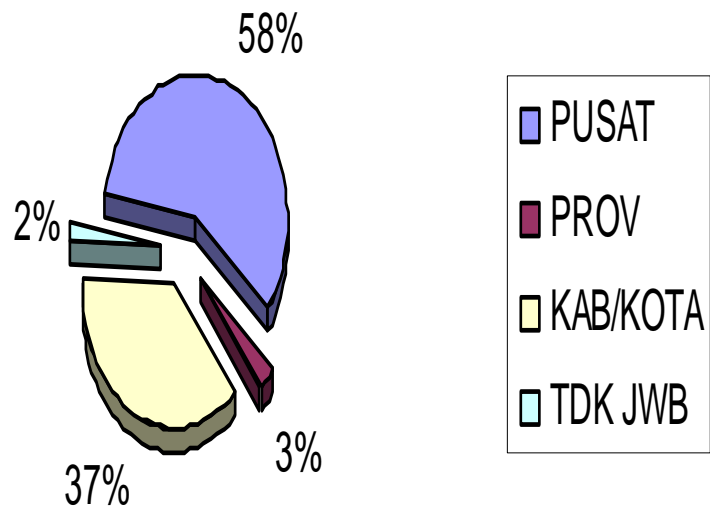


PROMOSI

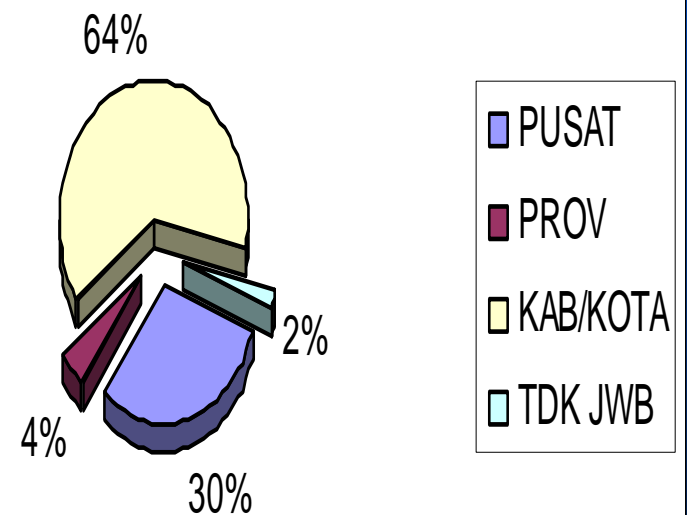


MENURUT SDR, SIAPA YG BERWENANG MENGELOLA KEPEGAWAIAN DAERAH UNTUK ASPEK BERIKUT INI ? (N=278)

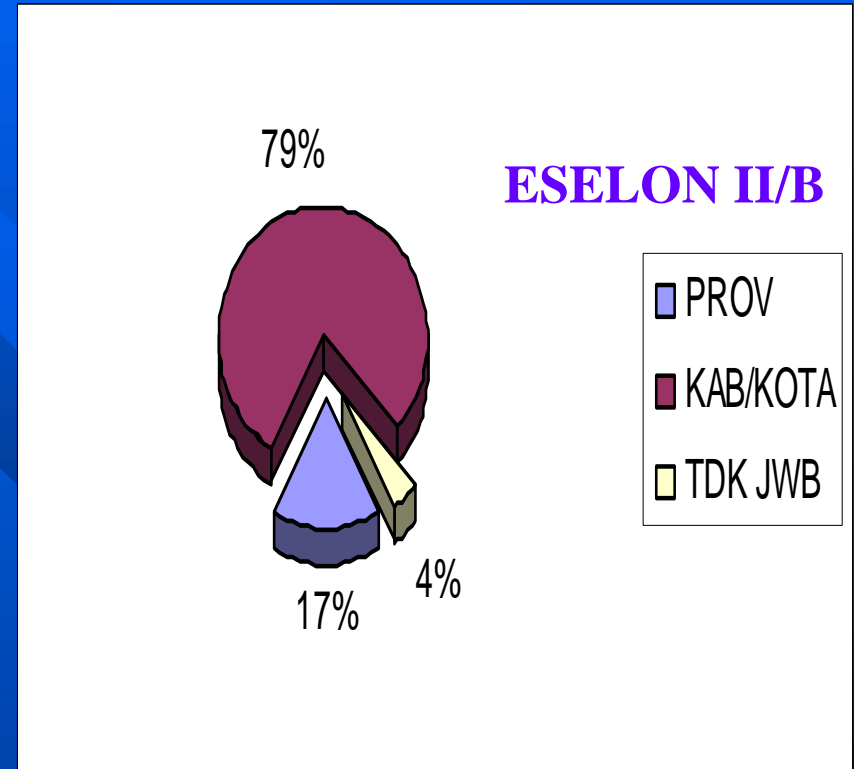
PENGGAJIAN



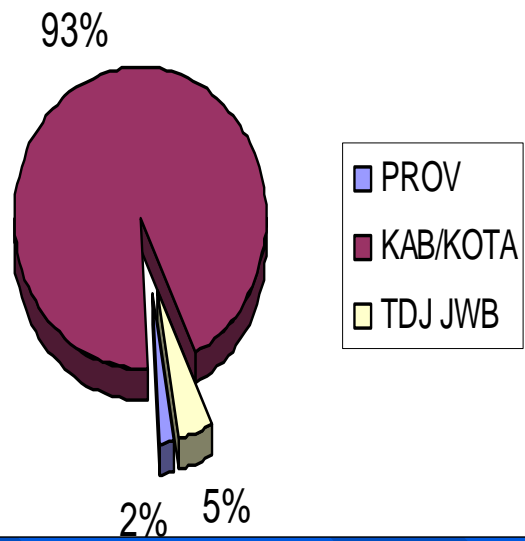
PENSIUN



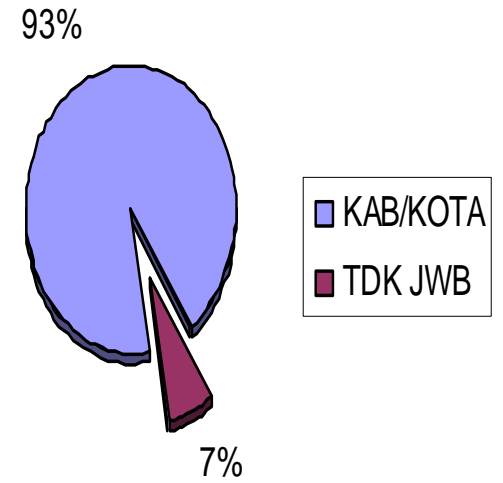
Menurut Sdr, siapa yg berwenang untuk mutasi pejabat eselon berikut ini ?(N=278)



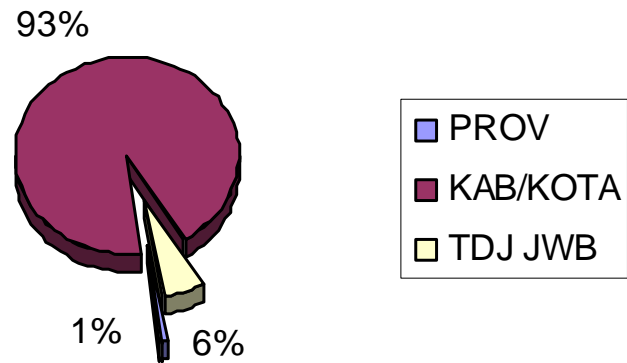
ESELON III/A



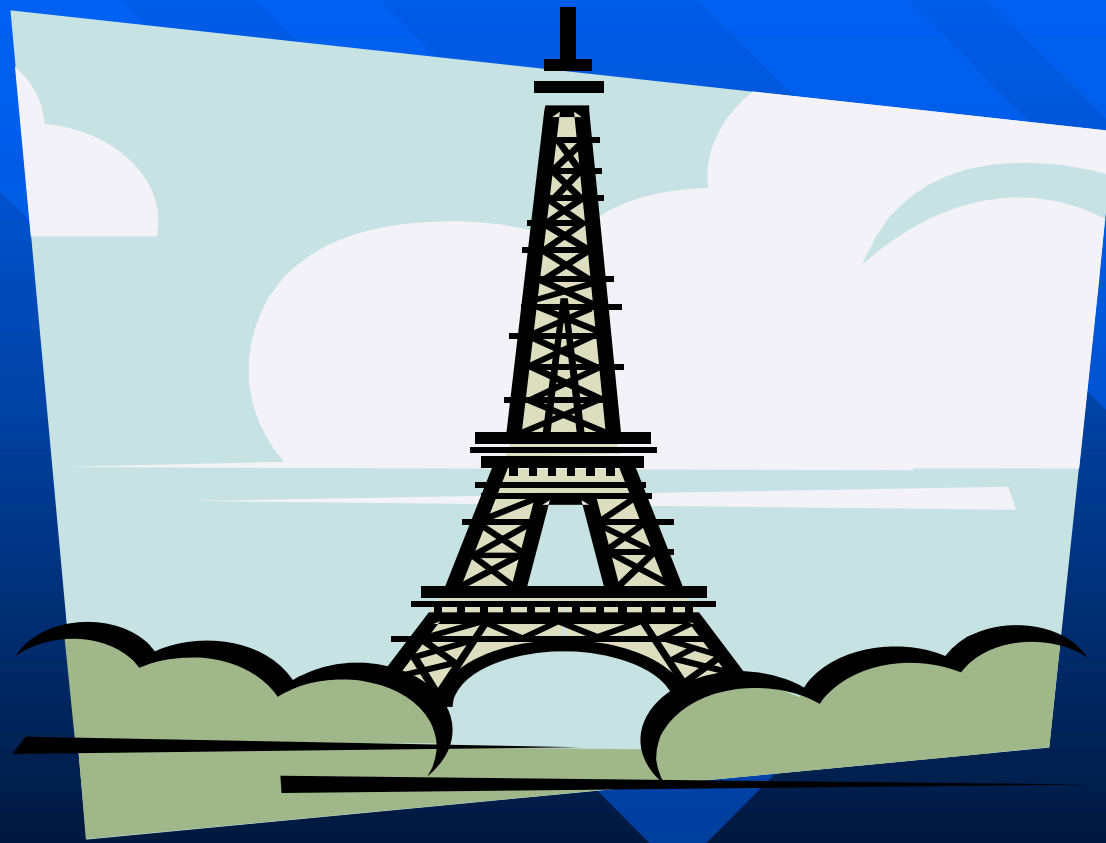
ESELON IV



ESELONJ III/B



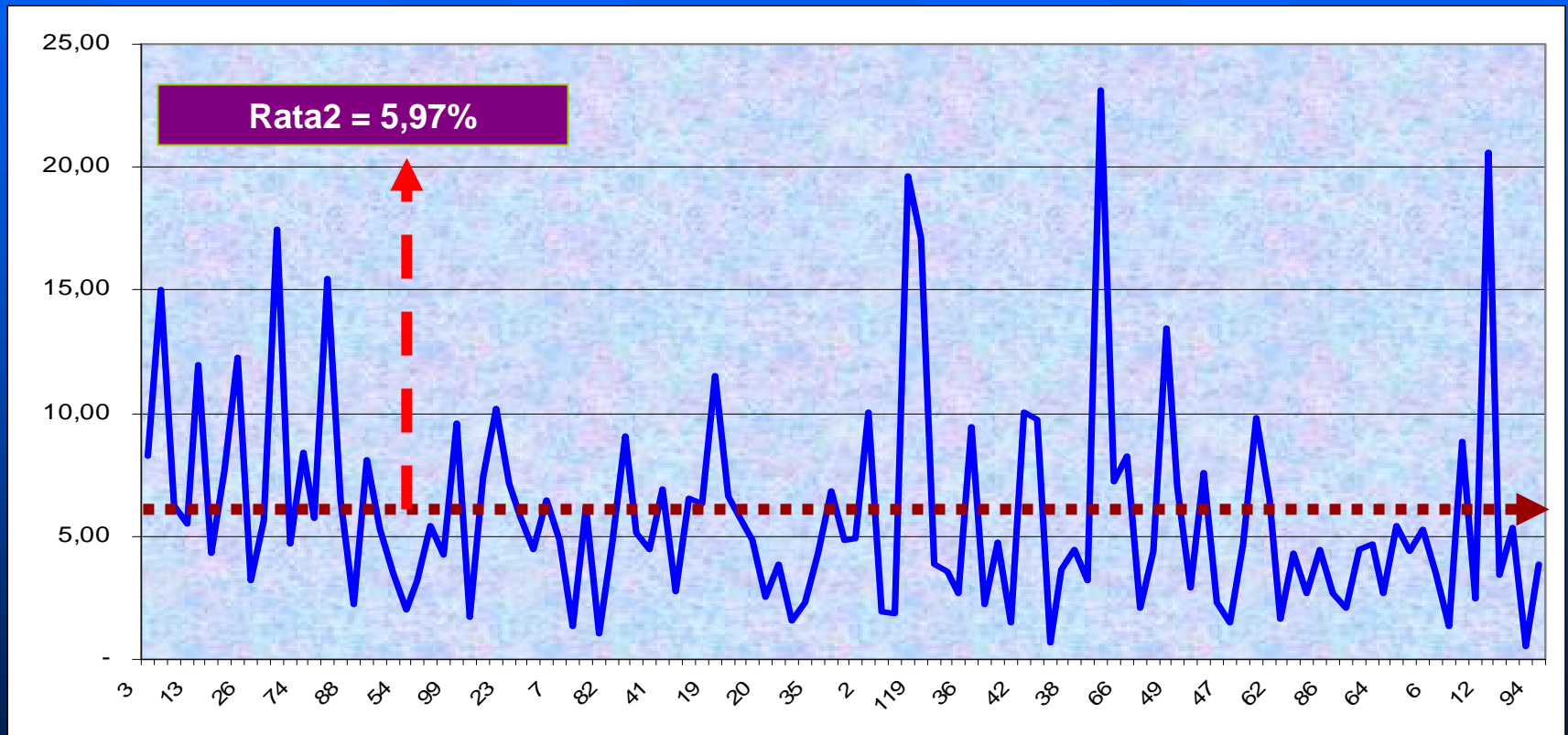
KEUANGAN



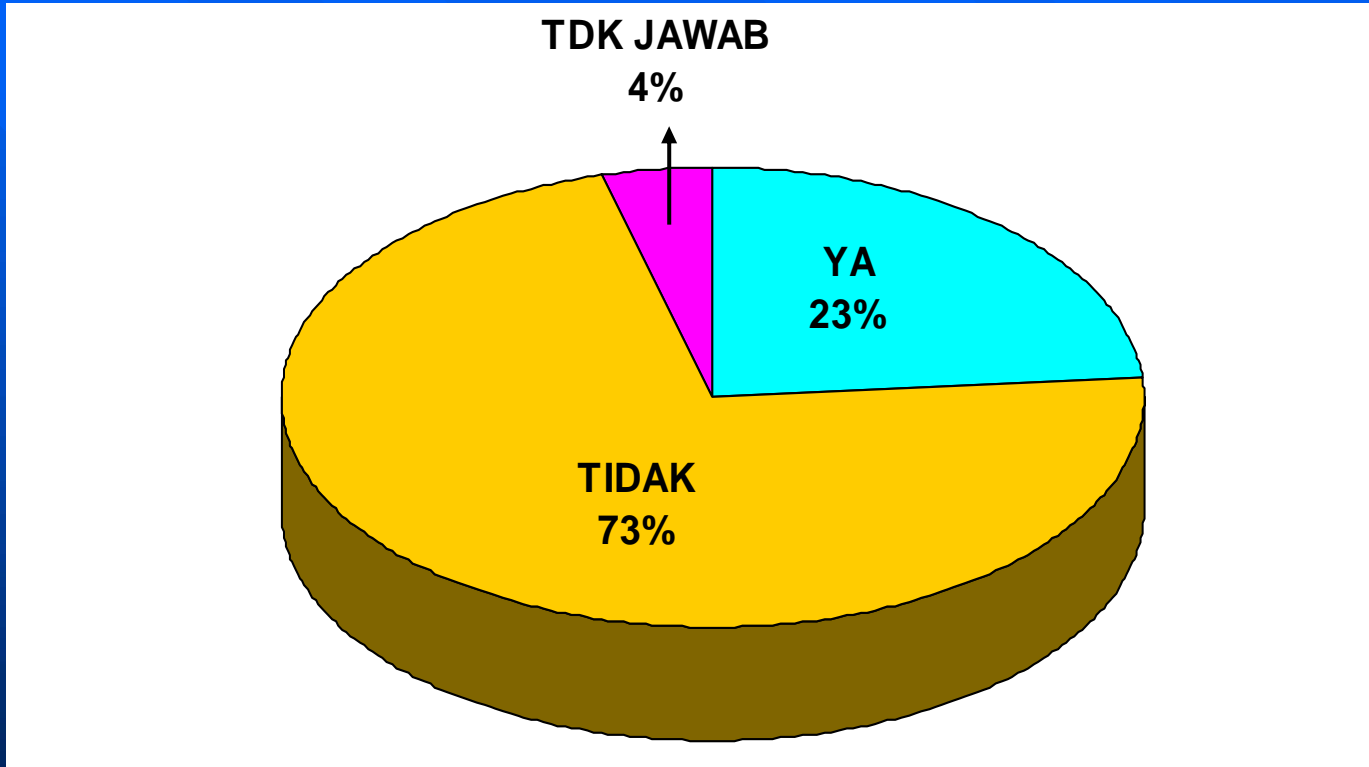
PERSENTASE PAD TERHADAP APBD

Menurut Kabupaten & Kota

(n=253)

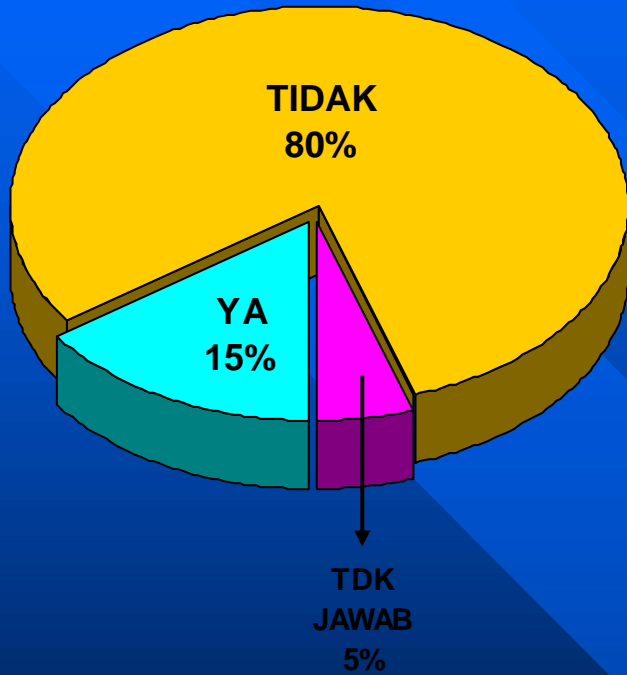


Apakah Peningkatan PAD terhambat oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

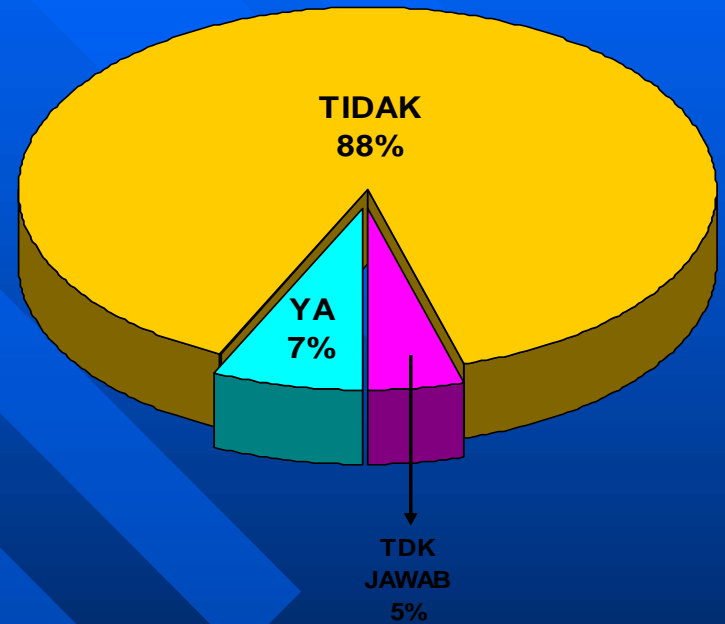


N = 278

Adakah PERDA ttg Pajak & Retribusi yang bermasalah

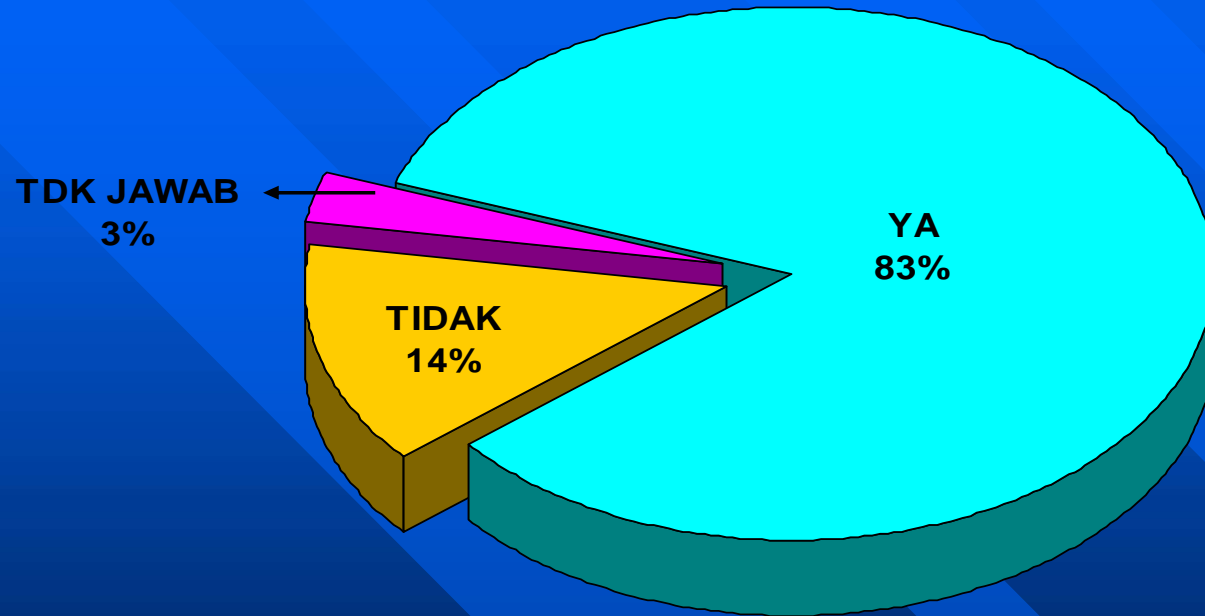


Apakah Masyarakat pernah menolak PERDA ttg Pajak & Retribusi?



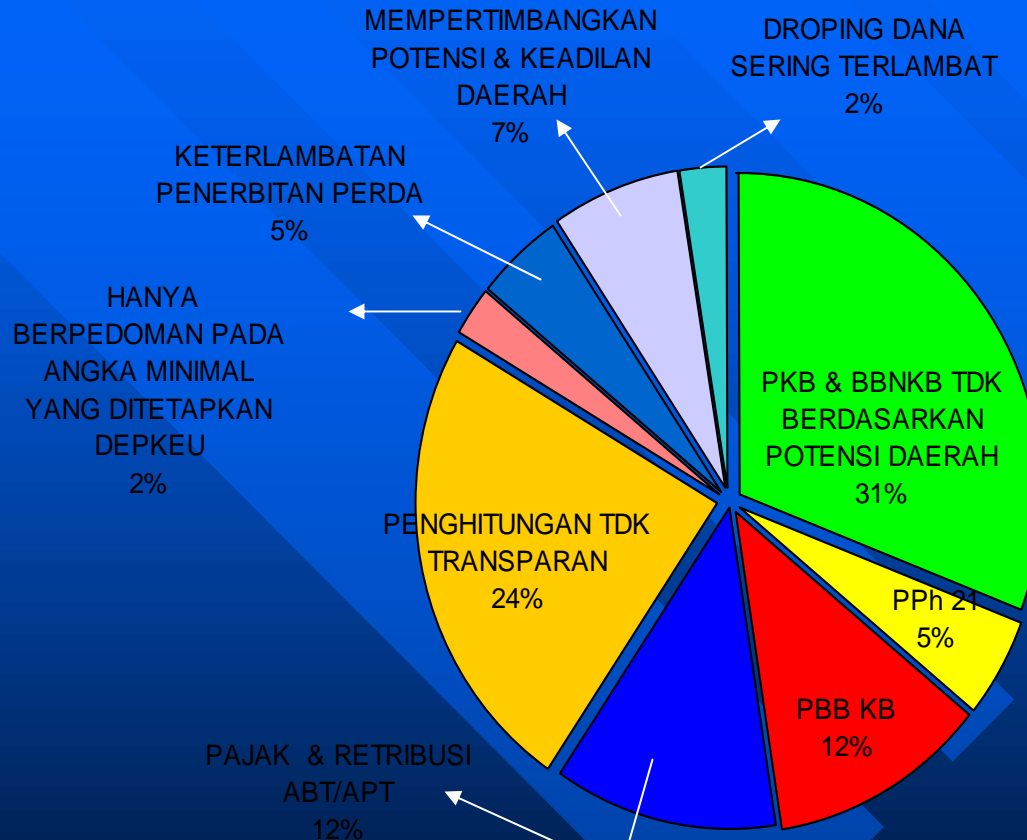
N = 278

Apakah Bagi Hasil Pajak Provinsi yang diterima Kab/Kota sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku?



N = 278

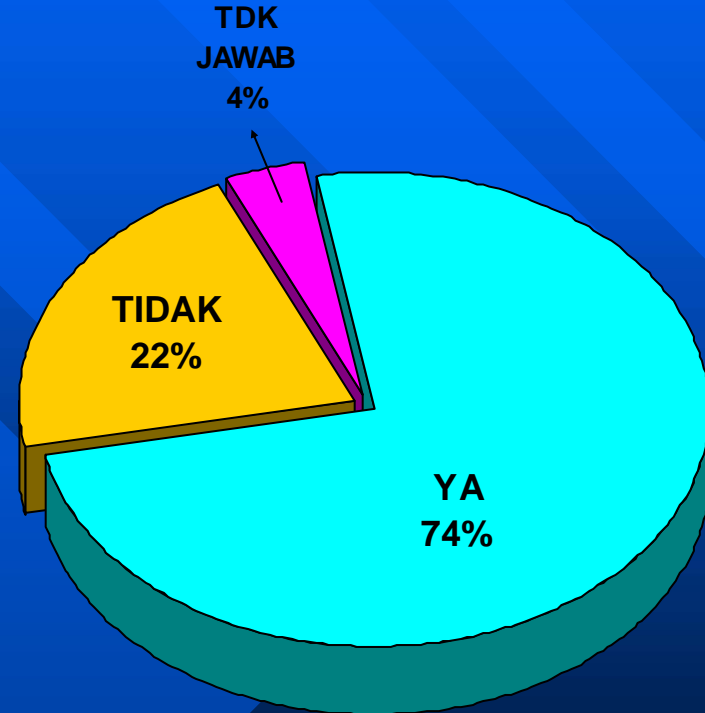
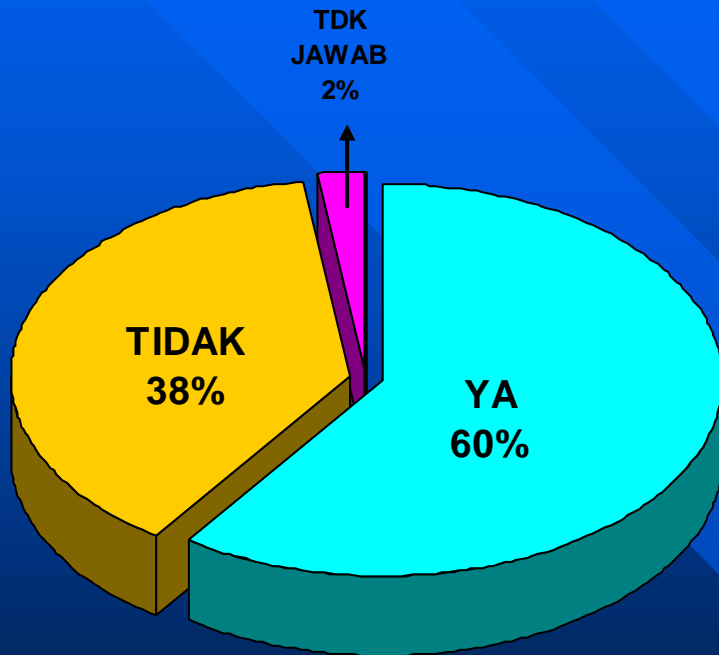
PENYEBAB BAGI HASIL PAJAK PROVINSI TIDAK SESUAI



N = 278

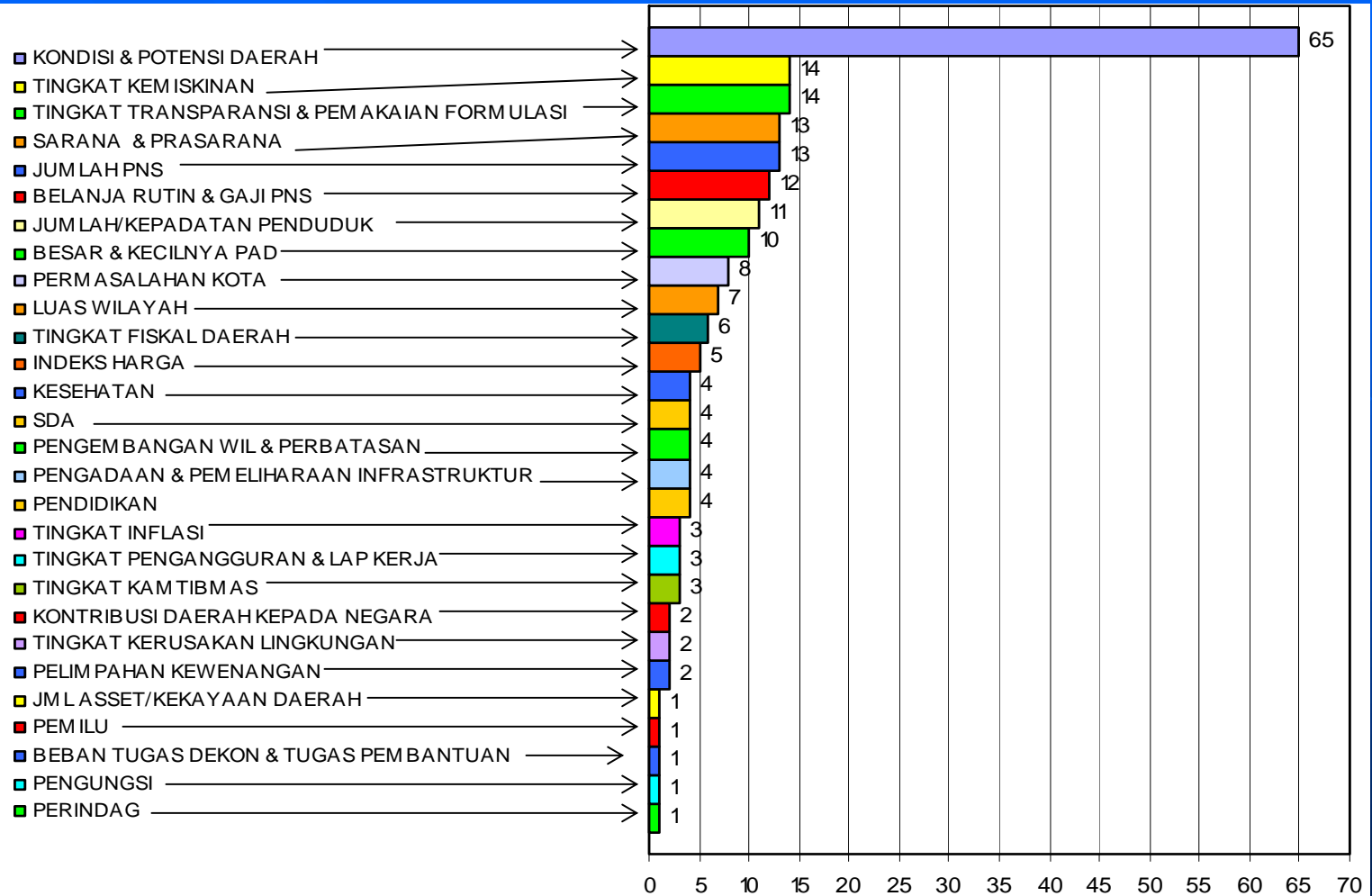
**Perluakah Revisi
Formula DAU?**

**Perluakah variasi peruntukan DAK
ditambah diluar ketentuan yang ada?**



N = 278

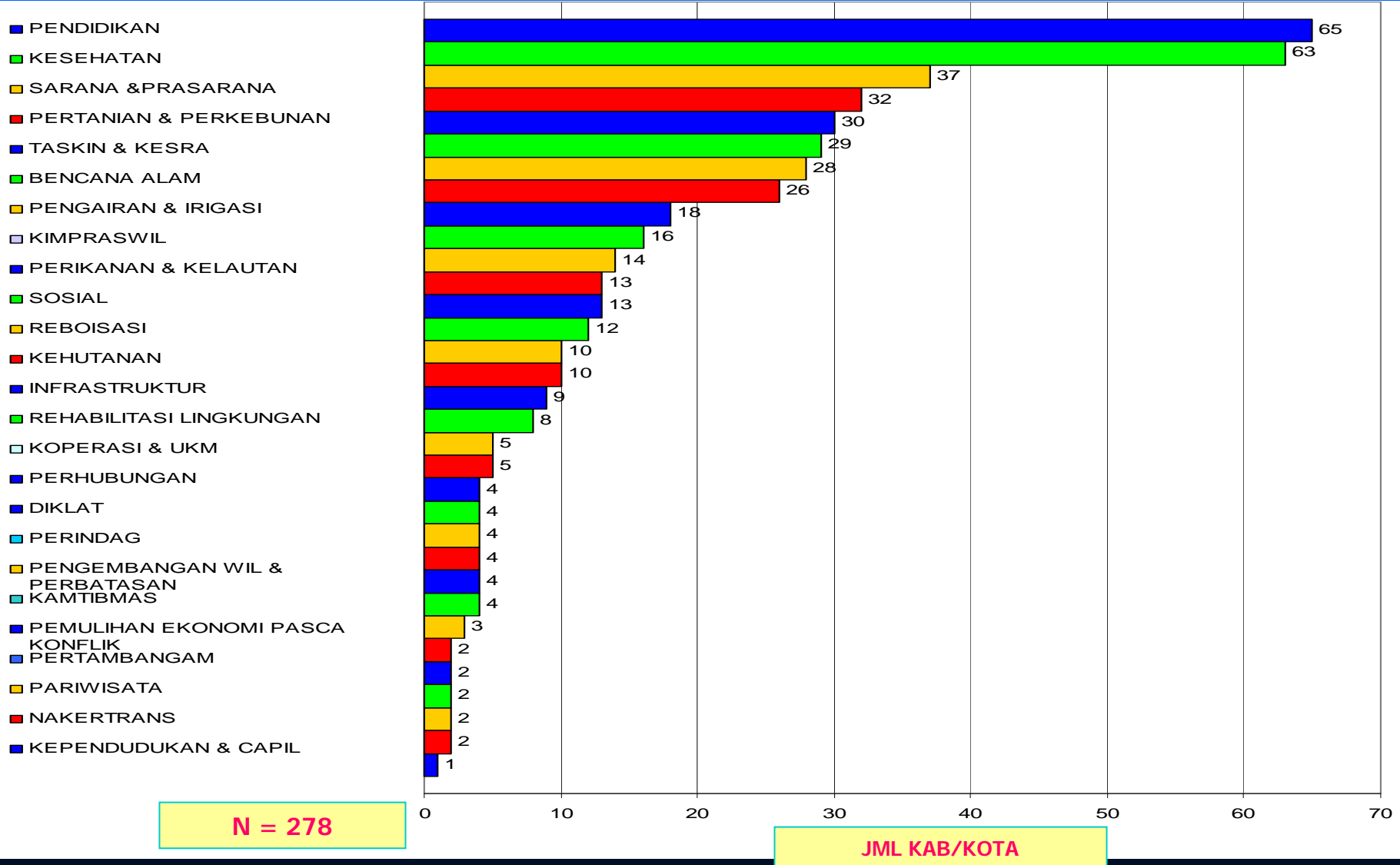
USULAN TAMBAHAN KRITERIA DAU



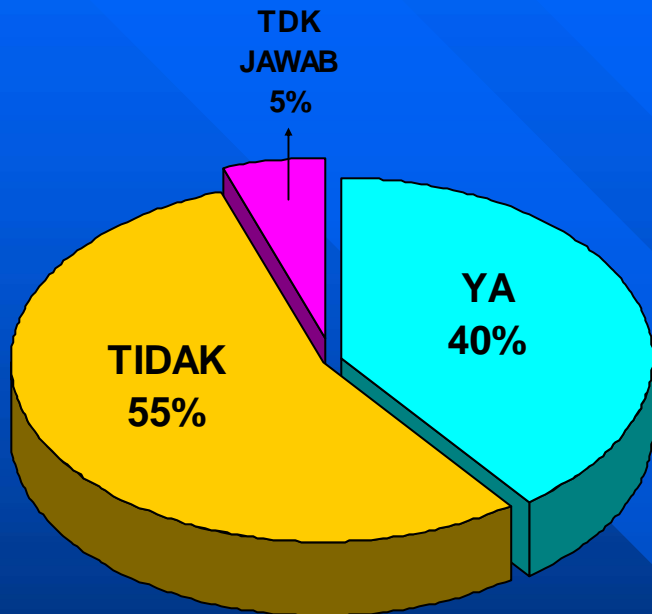
JML KAB/KOTA

N = 278

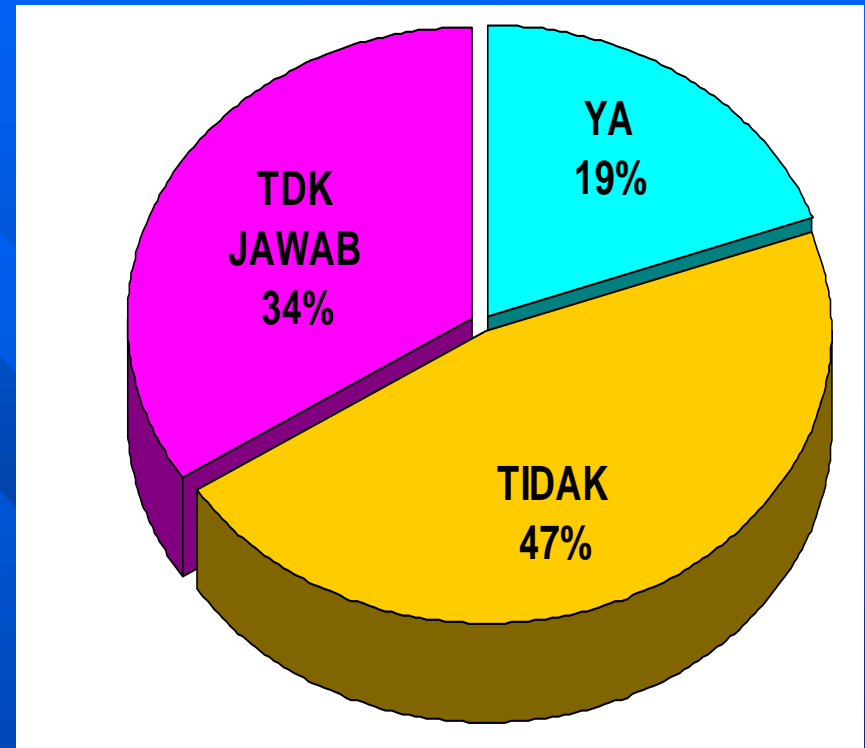
USULAN TAMBAHAN DAK



**Apakah Daerah Sdr.
mendapat dana Dekon?**

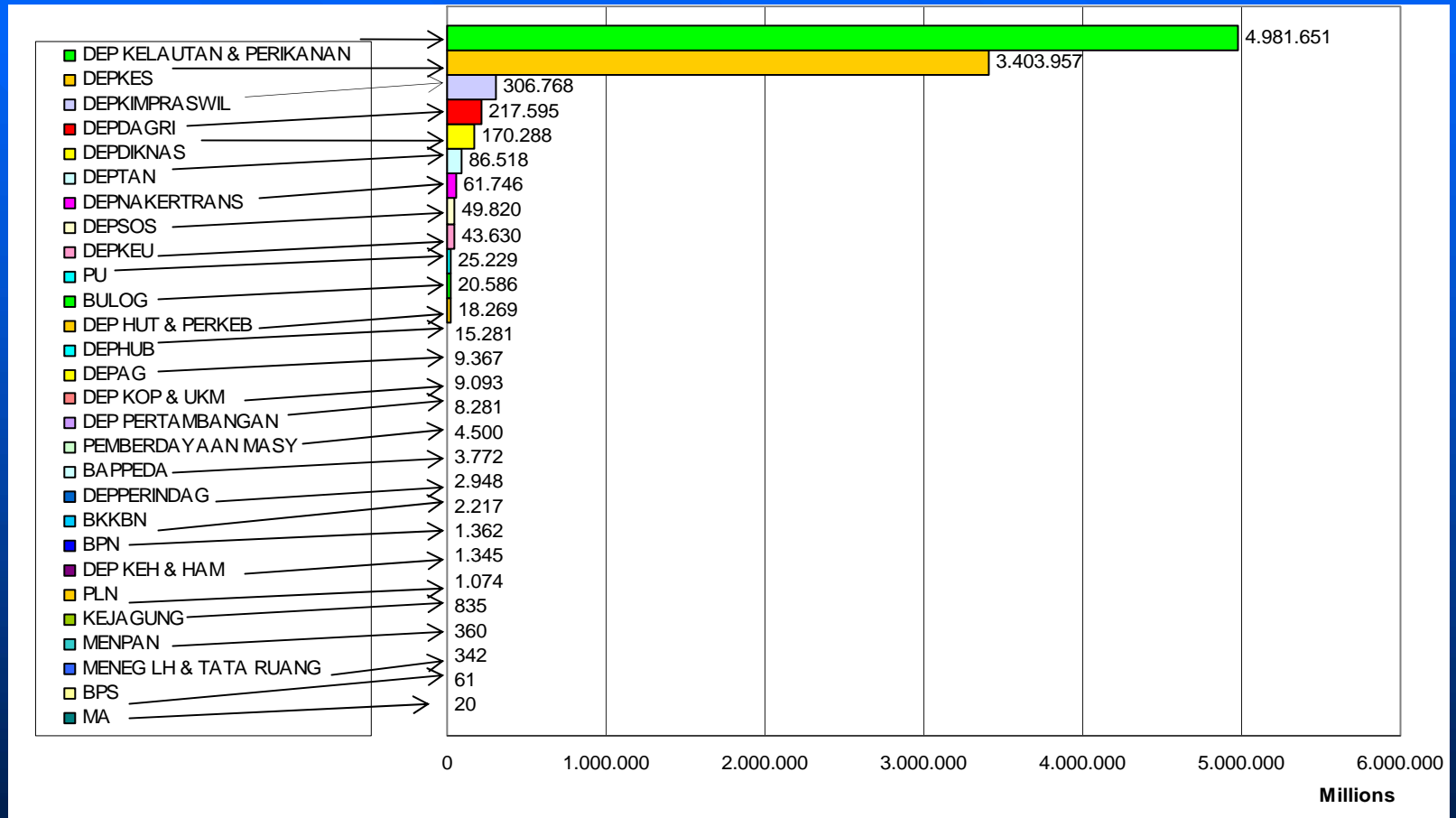


**Apakah dana Dekon. digunakan
Untuk urusan Desentralisasi**



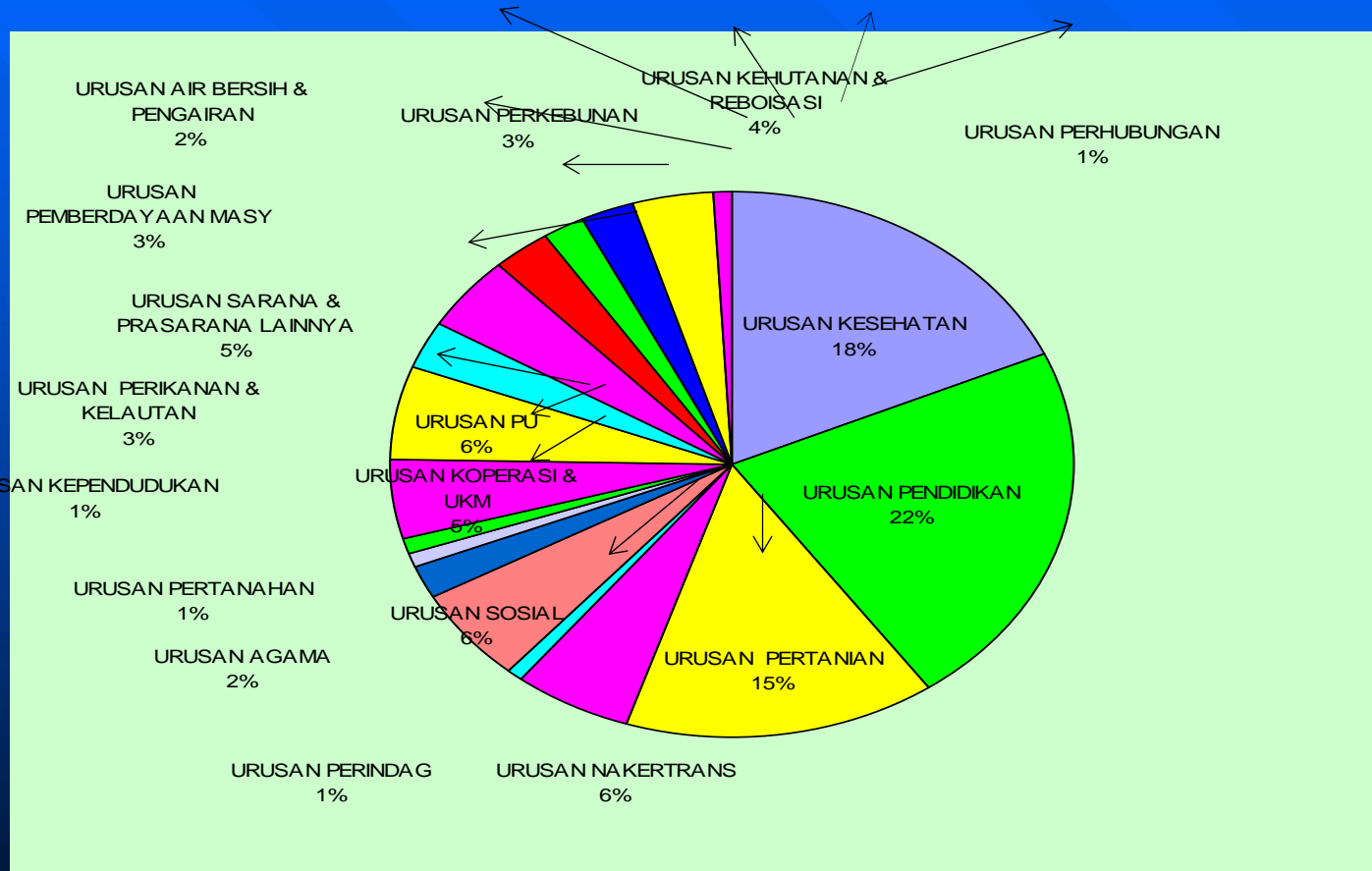
N = 278

DEPARTEMEN/LPND YANG MENYALURKAN DANA DEKONSENTRASI KE DAERAH



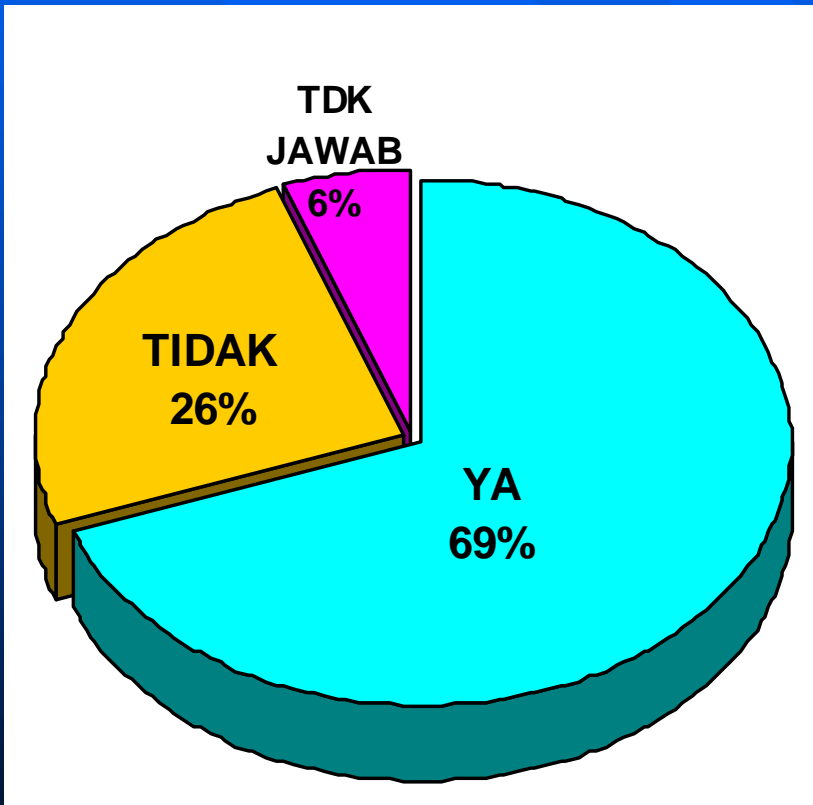
N = 278

URUSAN-URUSAN DESENTRALISASI YANG MENGGUNAKAN DANA DEKONSENTRASI

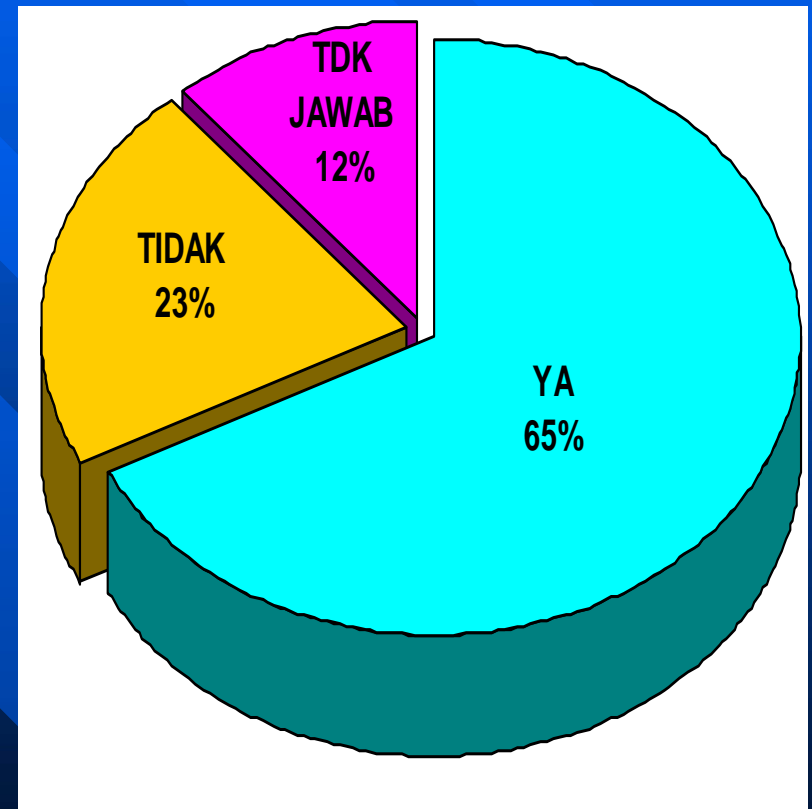


N = 278

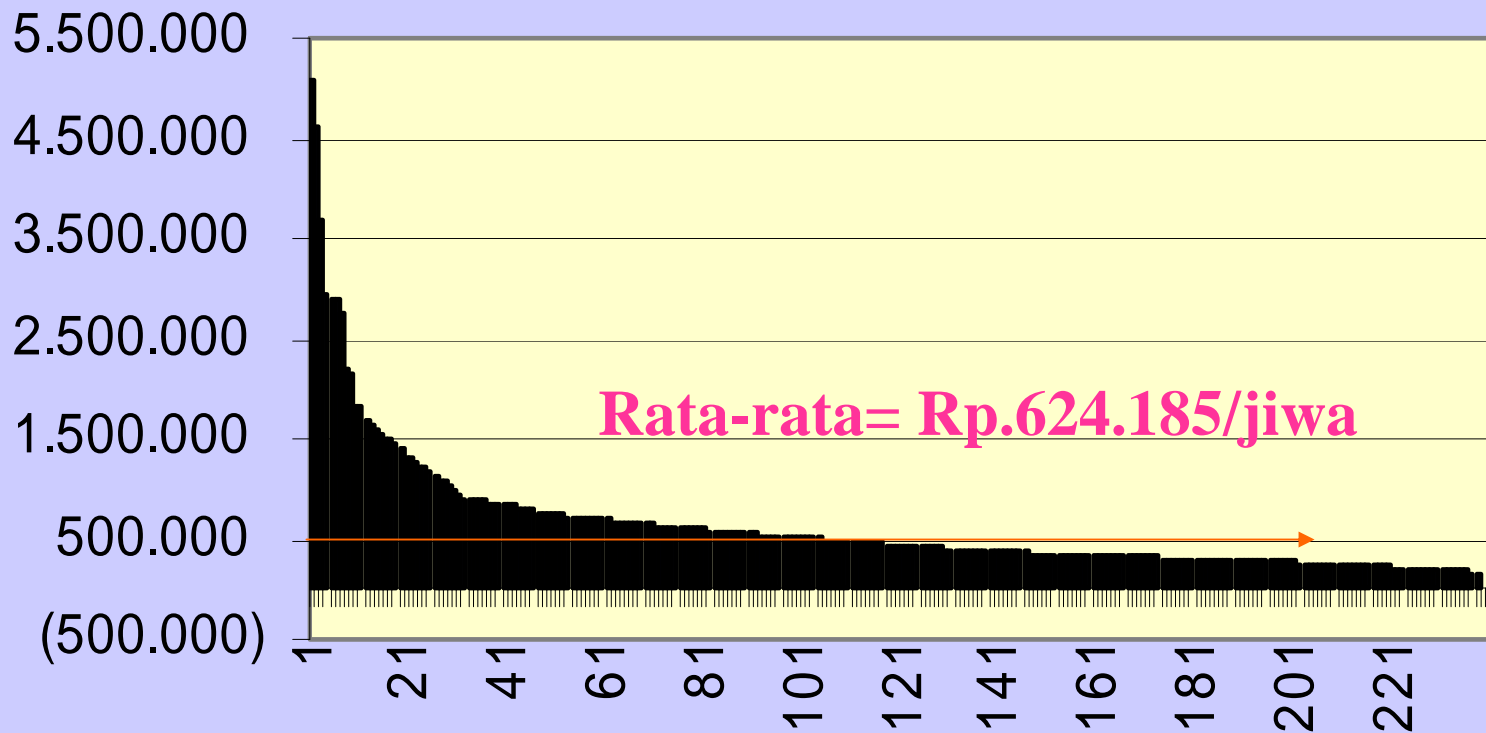
Apakah bersedia
Meminjam bila
Sumbernya dari Dalam
Negeri



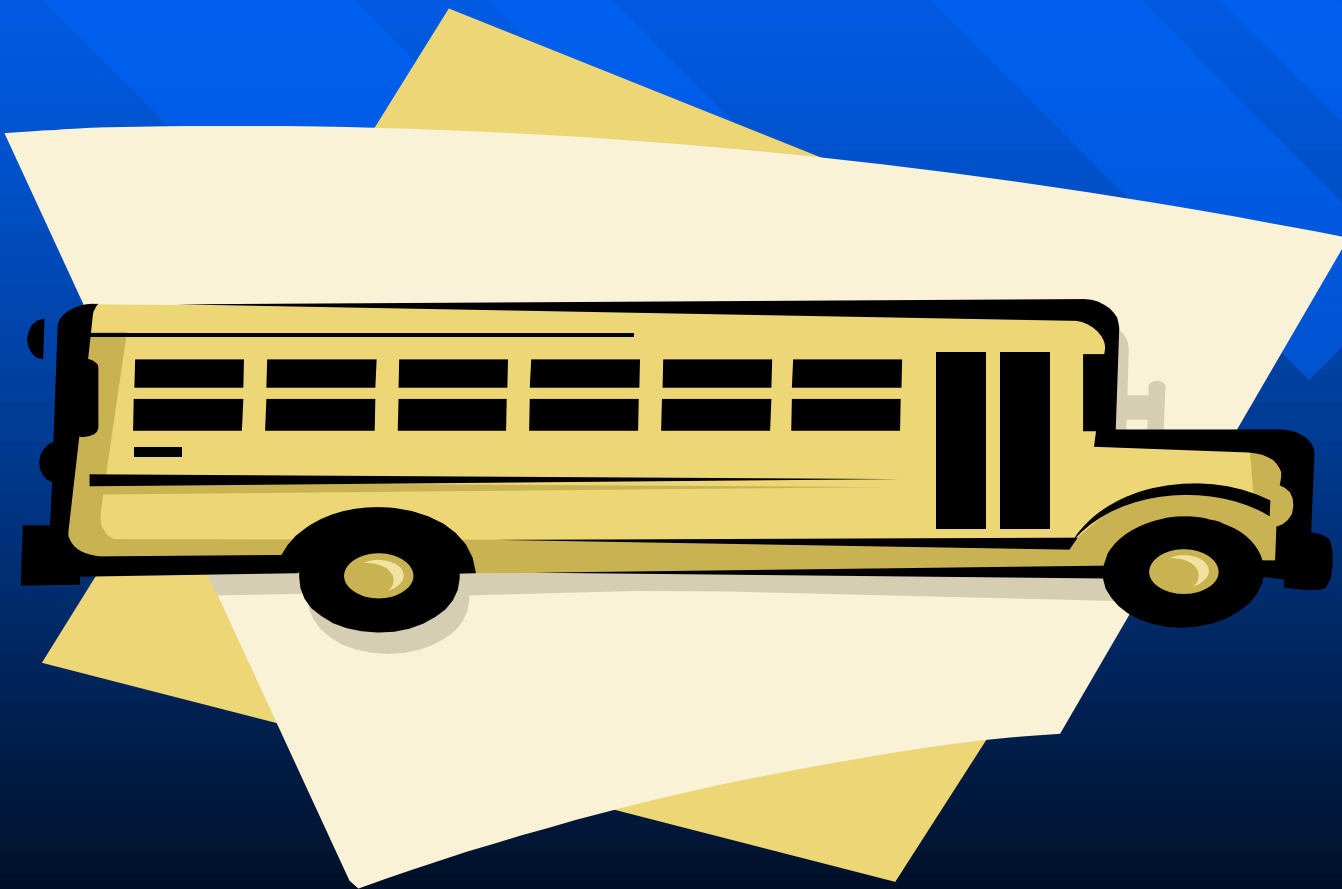
Bila Pusat bersedia menjamin
BLN,apakah Sdr.mau meminjam?



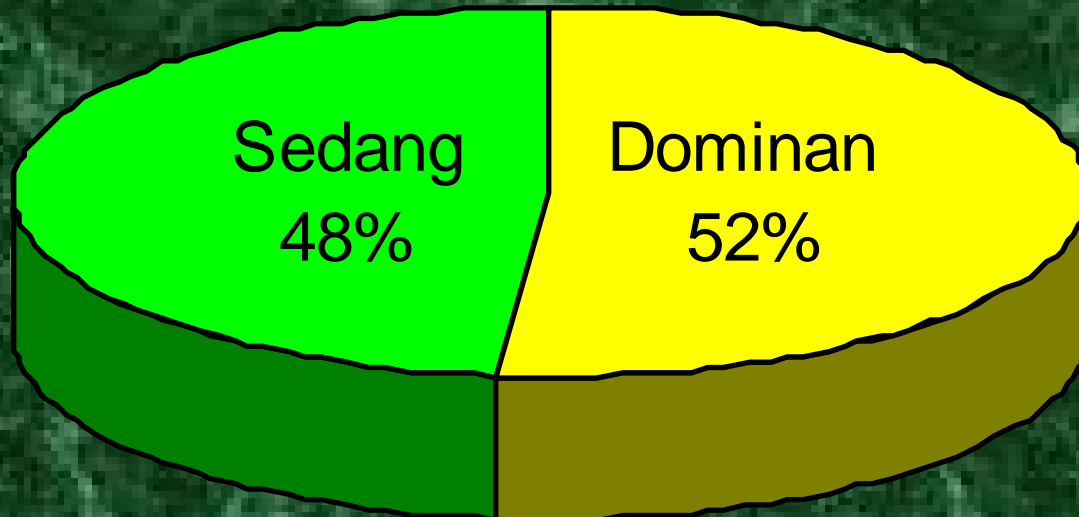
RASIO APBD/PENDUDUK (Rp/Jiwa)



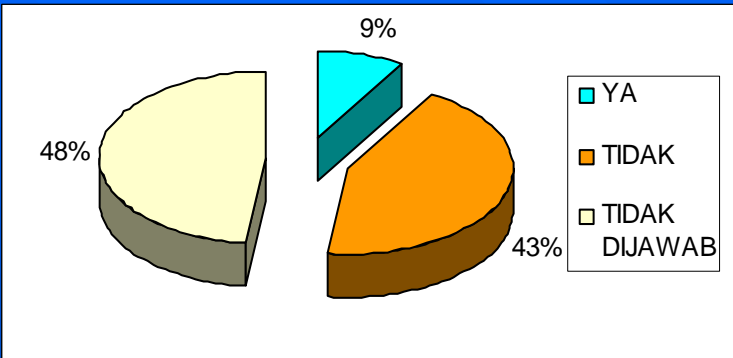
DPRD



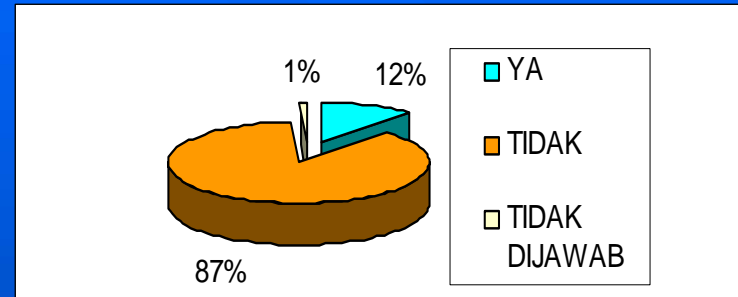
DOMINASI DPRD DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Menurut Kabupaten & Kota (Sample=274 Kab&Kota)



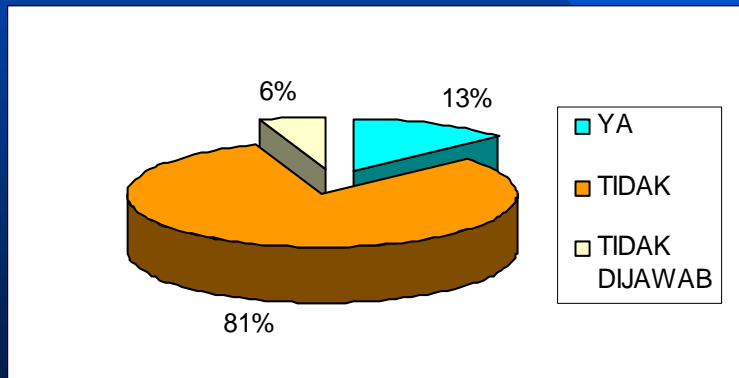
Jika peran DPRD dominan dlm pengambilan keputusan, apakah itu menghambat?



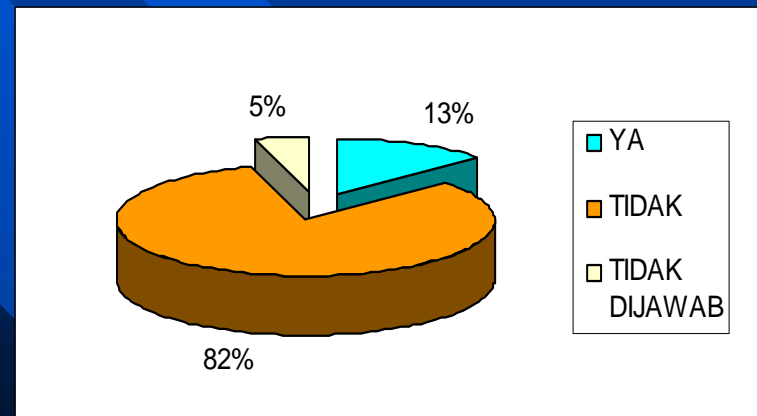
Apakah prinsip kemitraan yg sejajar antara Pemda dgn DPRD menimbulkan masalah?



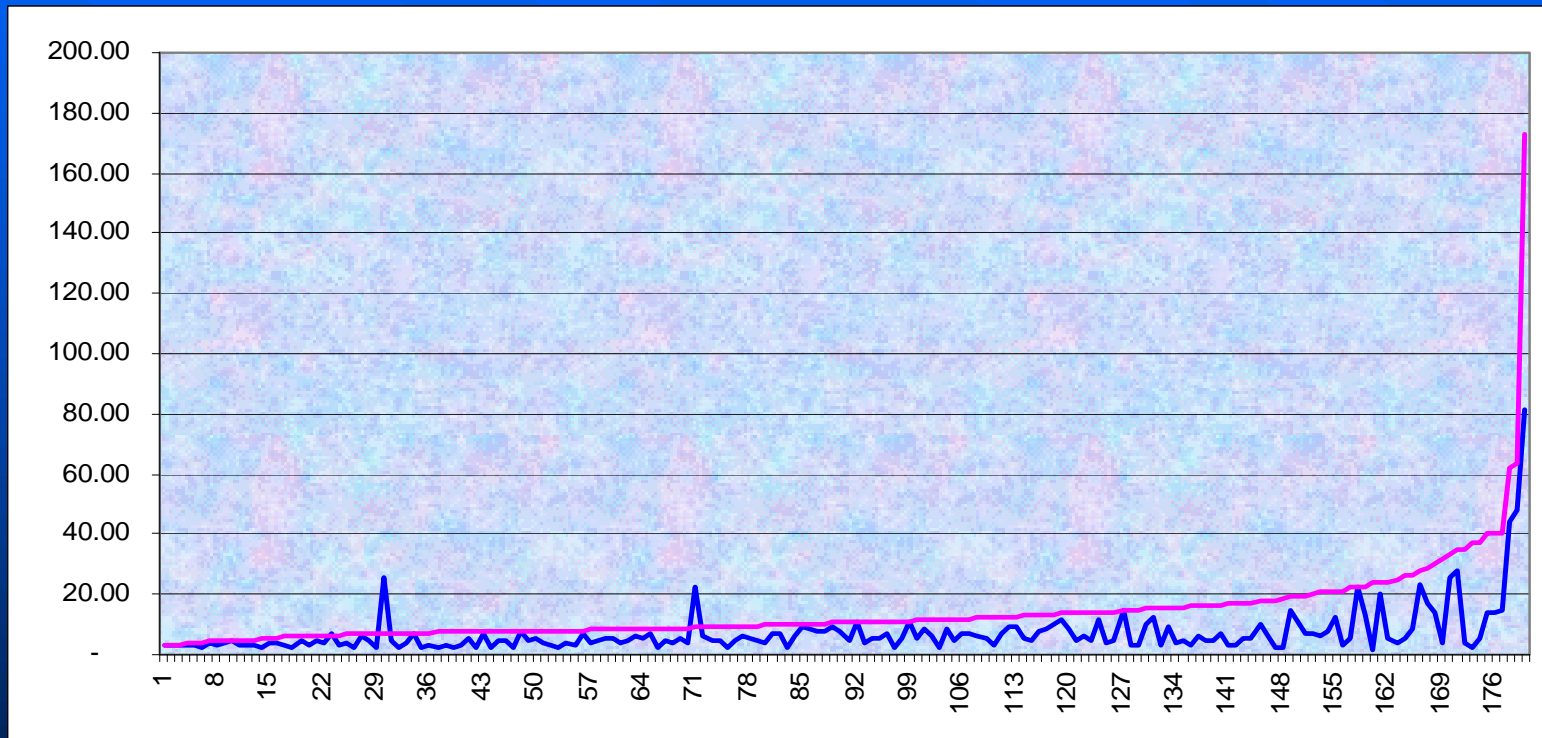
Apakah ada pengaruh DPRD dlm penentuan pejabat daerah?



Apakah sistem pertanggungjawaban Bupati/Walkot kpd DPRD menimbulkan masalah?



HONOR & ANGGARAN ANGGOTA DPRD Menurut Kabupaten & Kota (N =274)

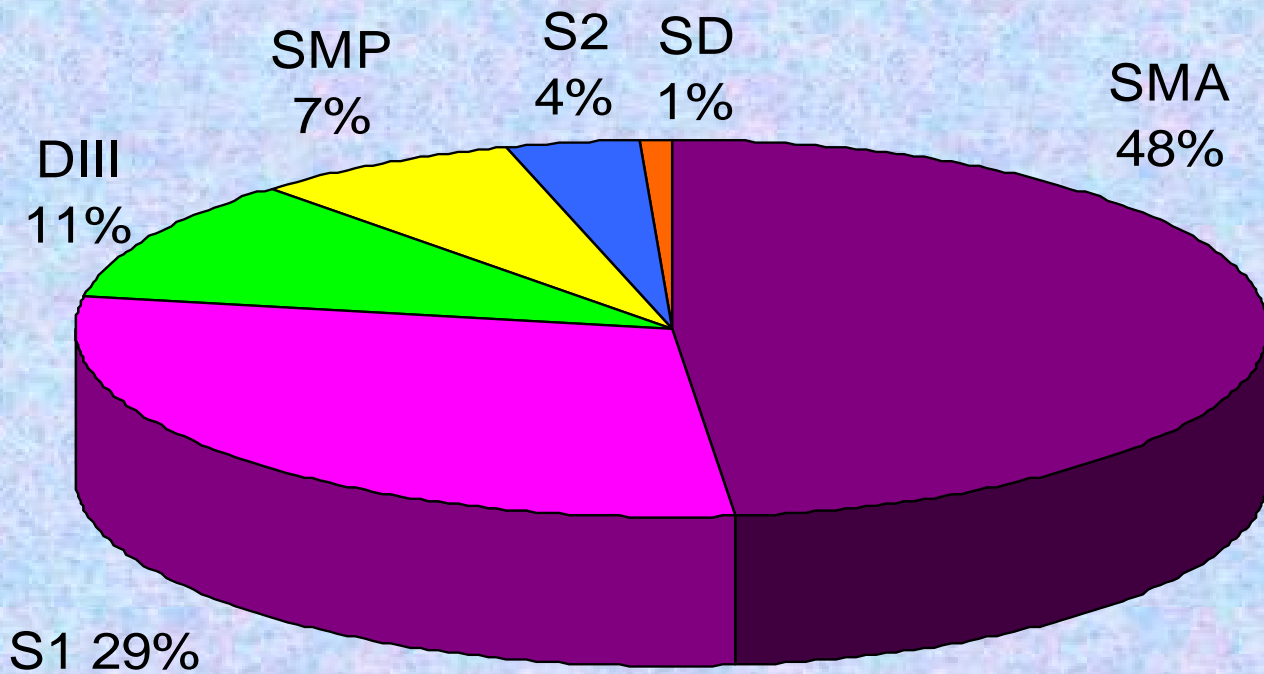


— Anggaran
— Honor

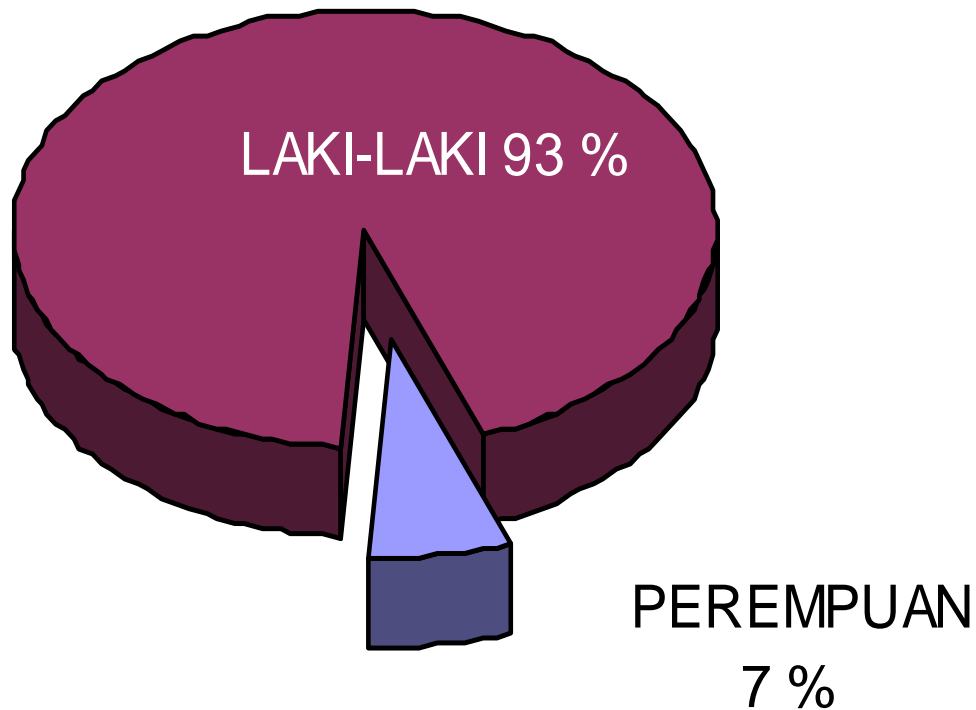
TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA DPRD

Menurut Kabupaten & Kota

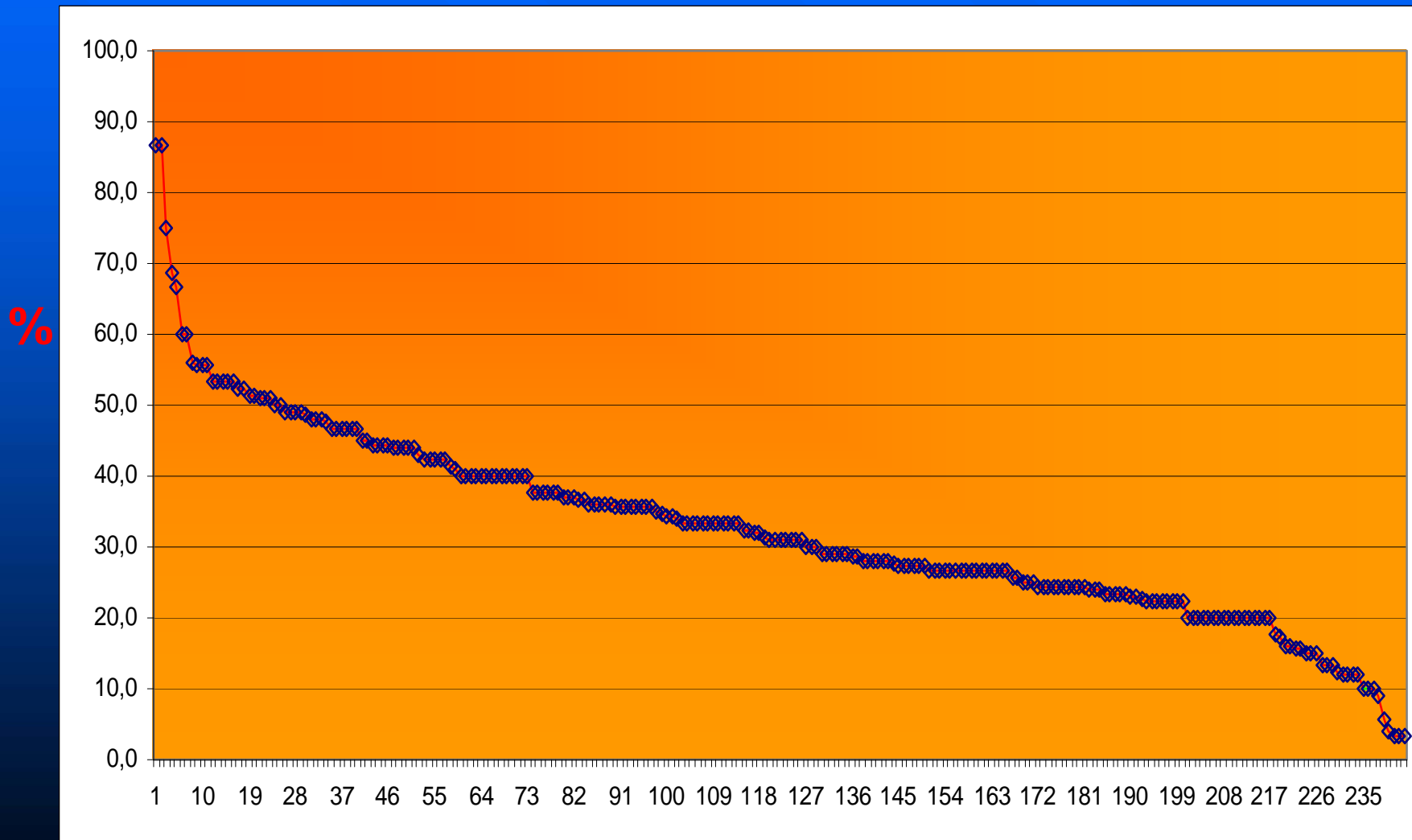
(Sample=277 Kab&Kota)



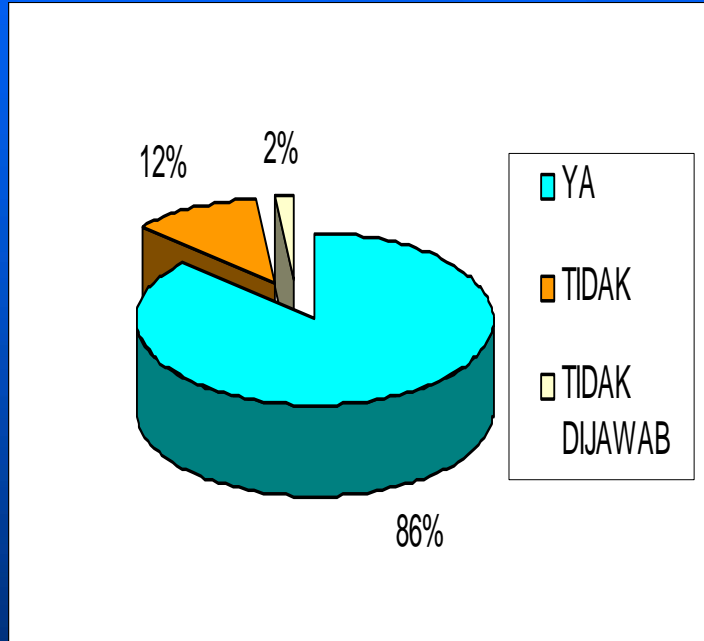
ANGGOTA DPRD MENURUT JENIS KELAMIN (N=277)



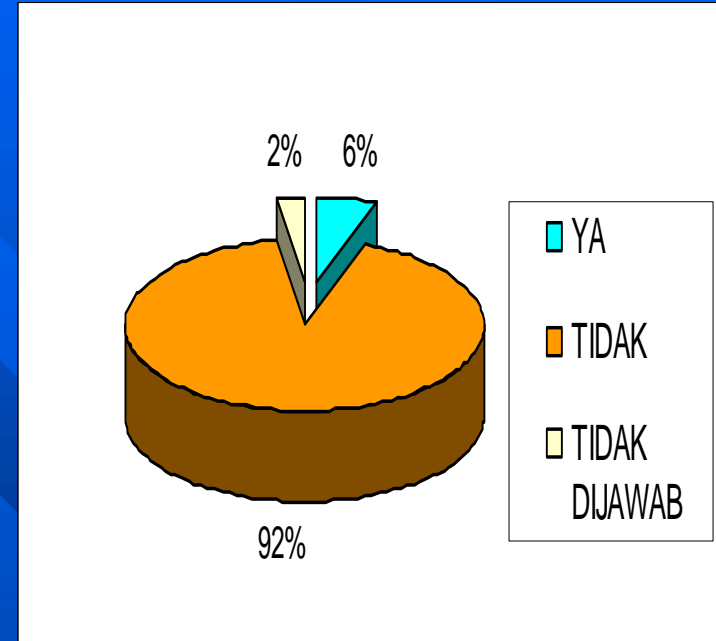
% ANGGOTA DPRD BERPENDIDIKAN S1 KE ATAS Menurut Kabupaten & Kota (Sample=277 Kab&Kota)



Apakah DPRD & Kepala Daerah perlu dipilih langsung ?



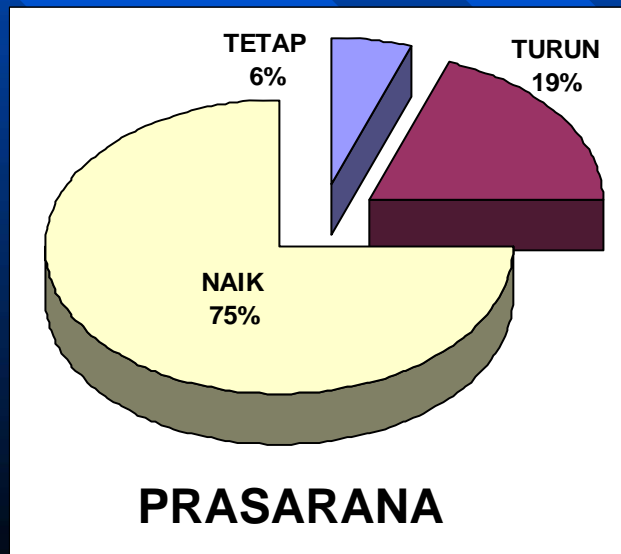
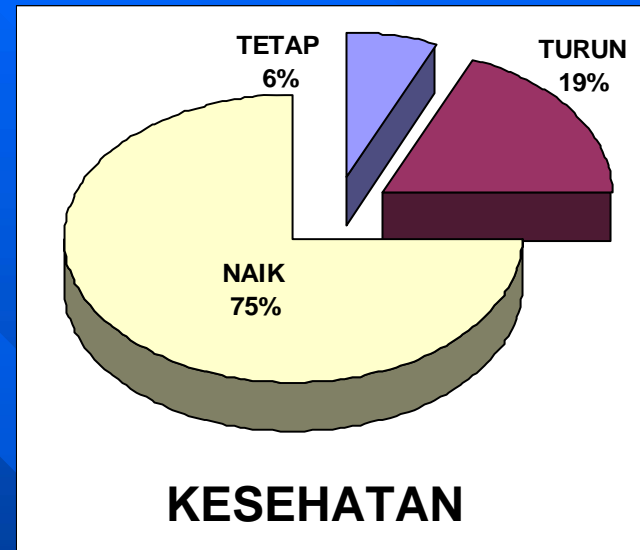
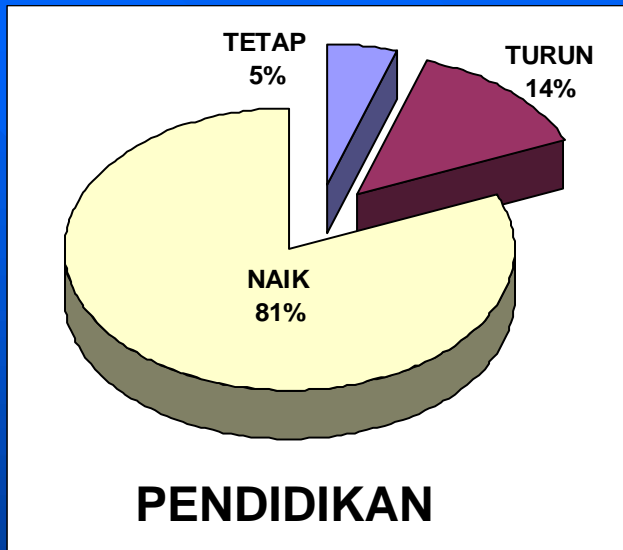
Pernahkah terjadi penolakan terhadap LPJ Kepala daerah ?



PELAYANAN UMUM

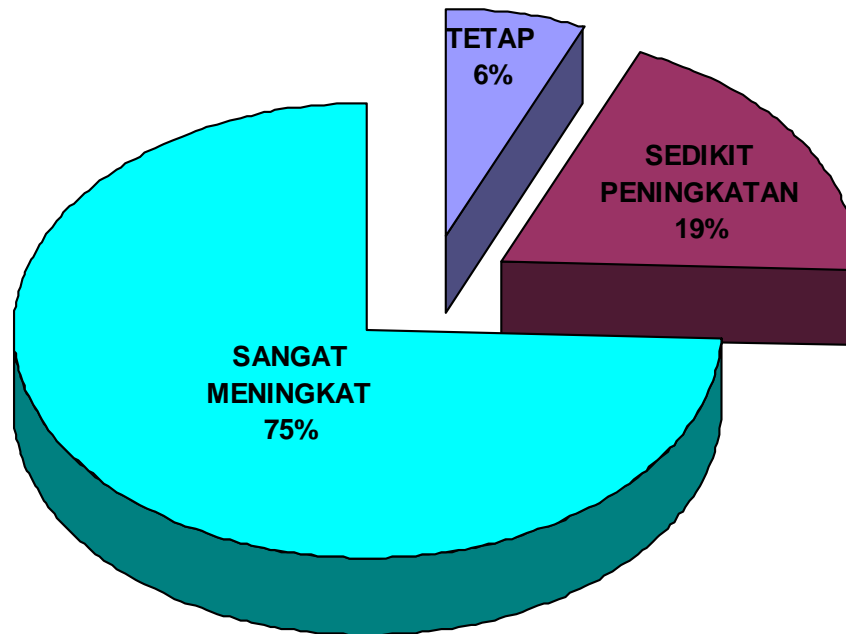


MELALUI DAU, KONDISI ALOKASI BIAYA PADA SEKTOR :

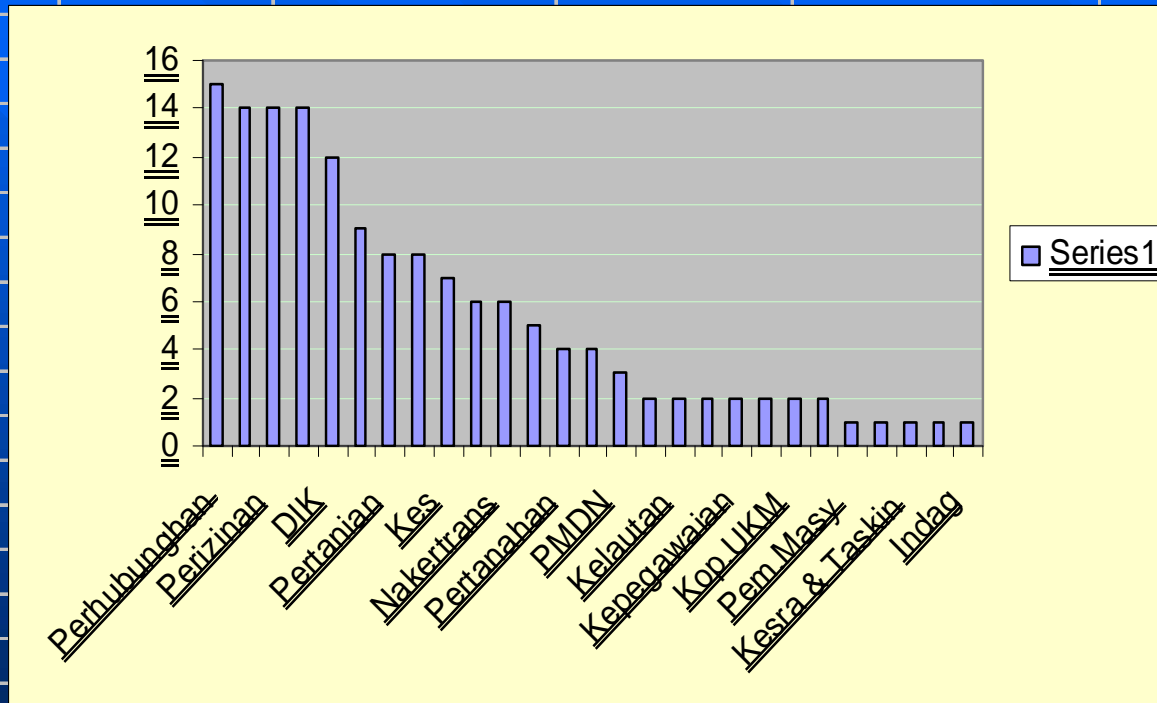


N=278

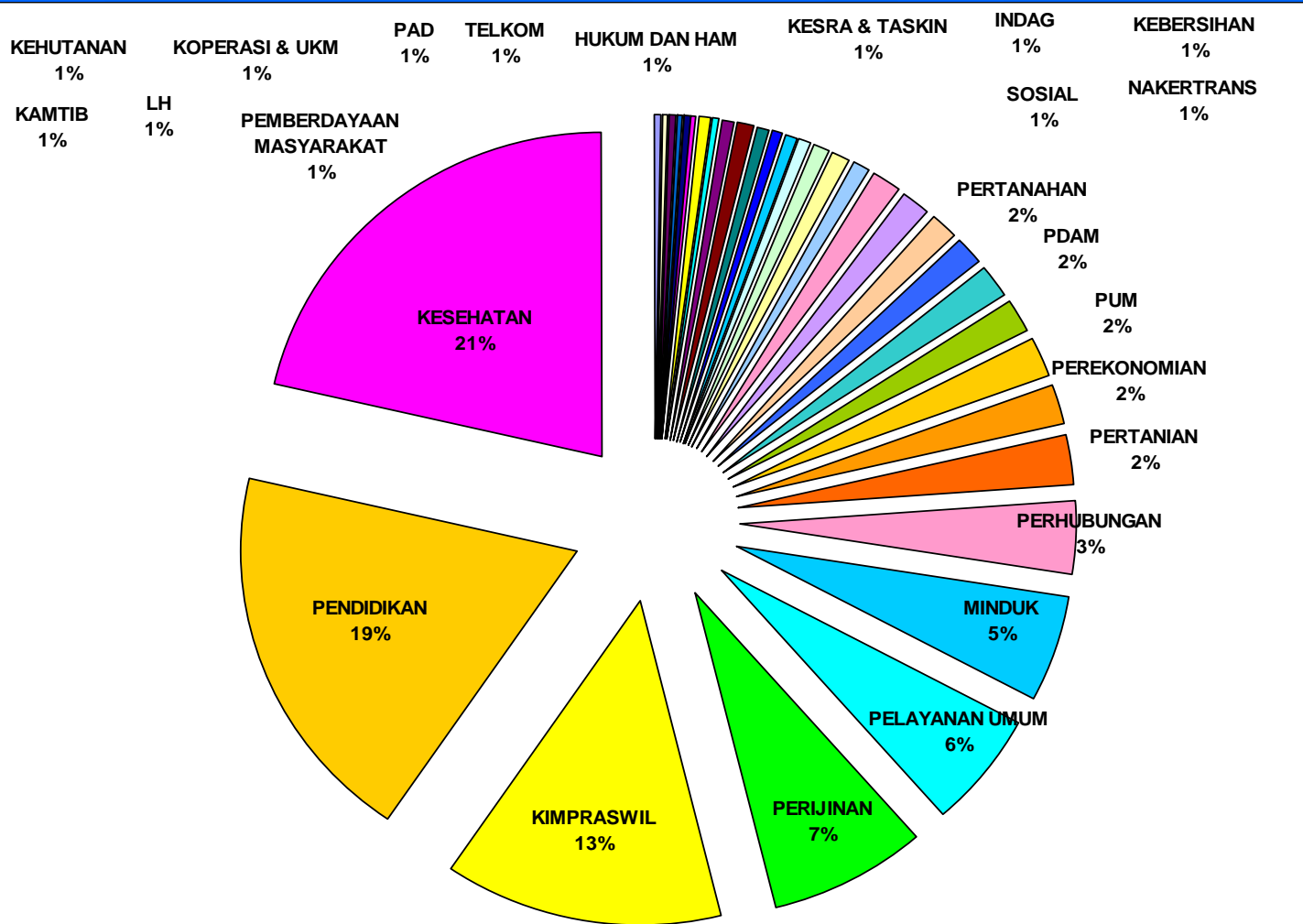
TUNTUTAN KUANTITAS/KUALITAS PENINGKATAN PELAYANAN



BID.PELAYANAN YG TUMPANG TINDIH ANTARA KAB/KOTA DGN PROV (%)



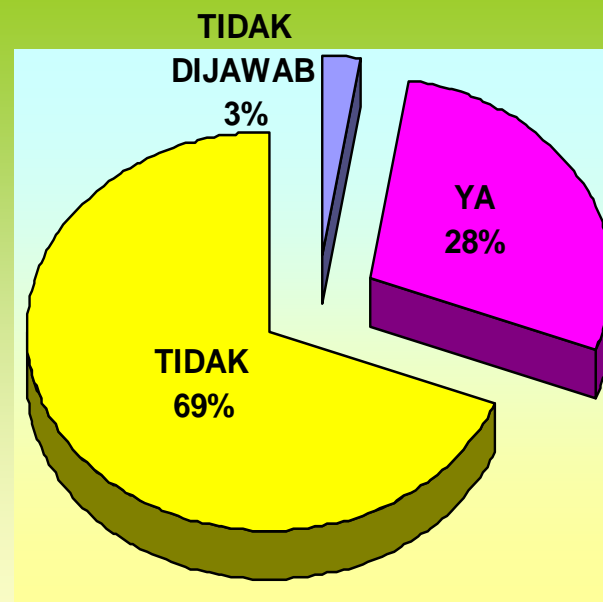
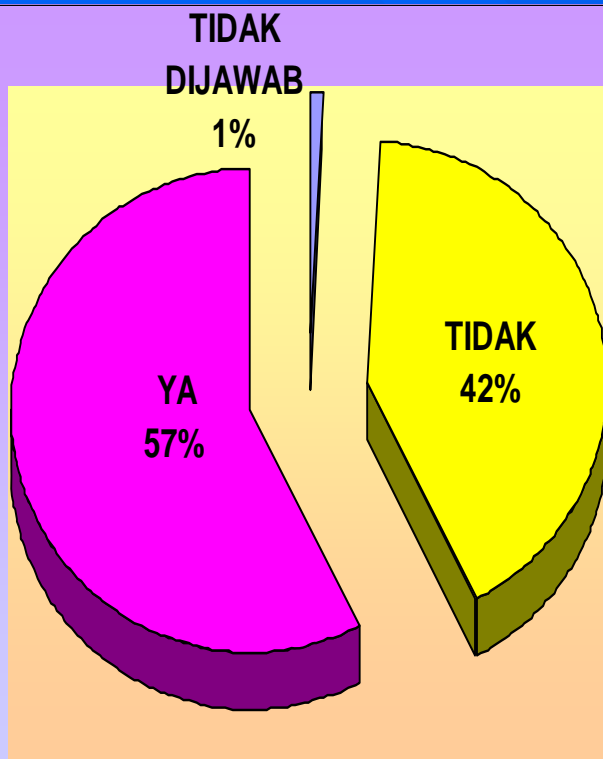
TUNTUTAN PENINGKATAN PELAYANAN UMUM DI DAERAH



N=263

**APAKAH ADA YG MELAKUKAN PROTES
THD PELAYANAN YG DIBERIKAN OLEH
KAB/KOTA**

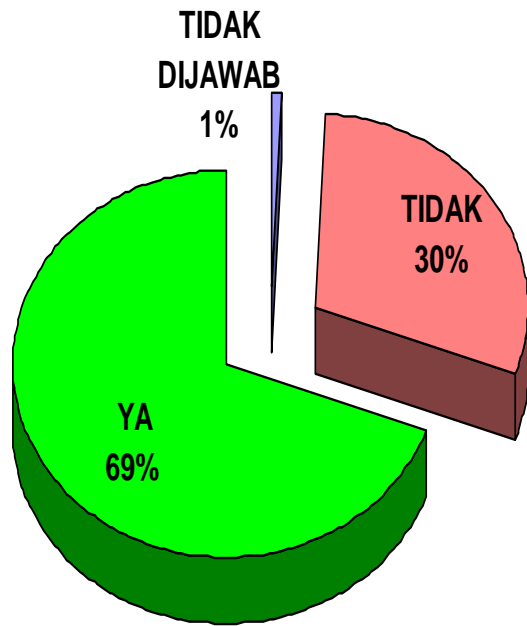
**APAKAH SAAT INI MASIH TERJADI
TUMPANG TINDIH PELAKSANAAN
PELAYANAN ANTARA PROVINSI DG
KAB/KOTA**



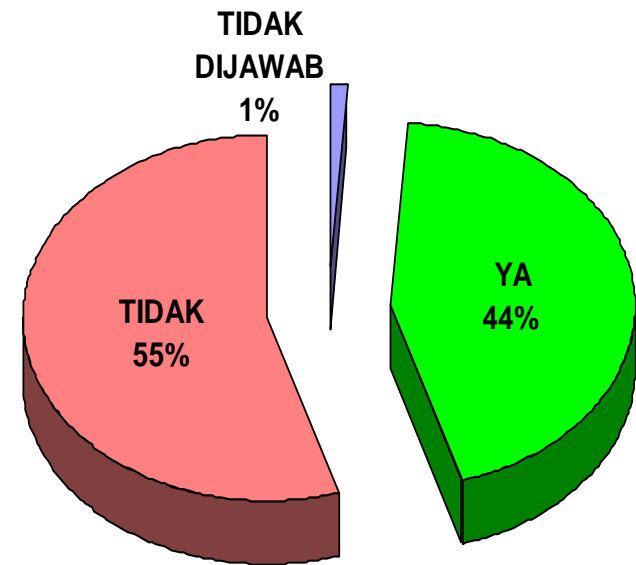
PENGAWASAN



**APAKAH FUNGSI PENGAWASAN
SEBAIKNYA DIDELEGASIKAN KEPADA
PROVINSI**

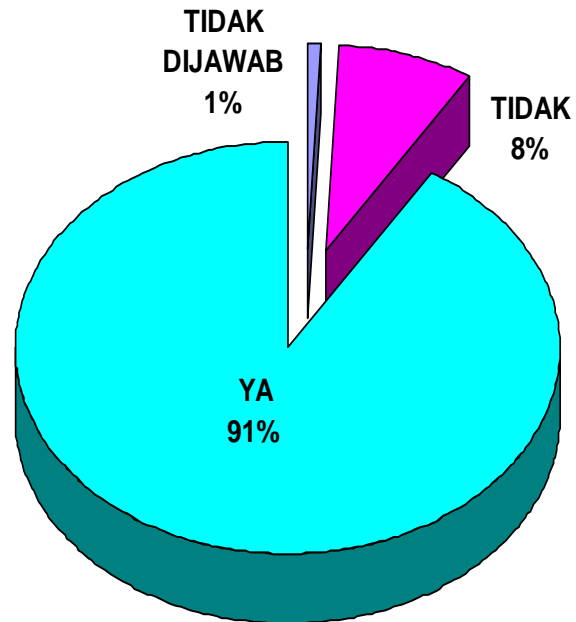


**APAKAH TERDAPAT TUMPANG
TINDIH PENGAWASAN OLEH PUSAT
TERHADAP DAERAH**

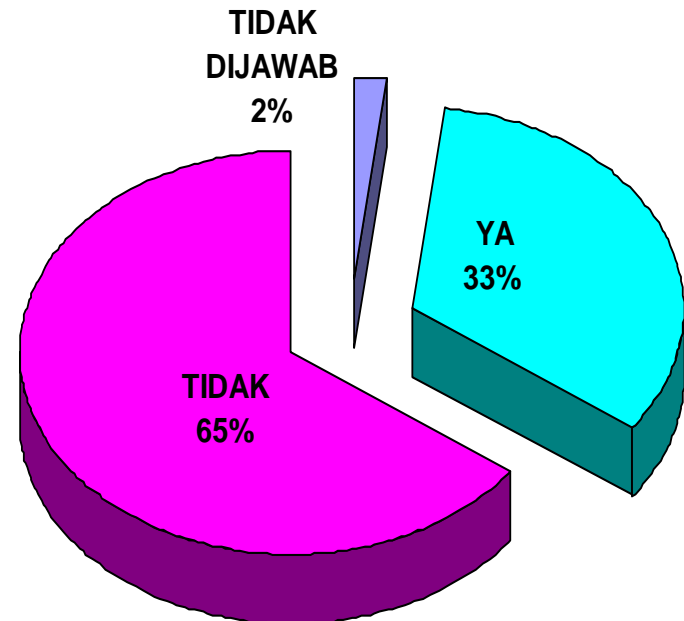


(N=278)

APAKAH PENGAWASAN EKSTERNAL MASIH DIPERLUKAN?



APAKAH PENGAWASAN OLEH DPRD TUMPANG TINDIH DGN PENGAWASAN FUNGSIONAL?



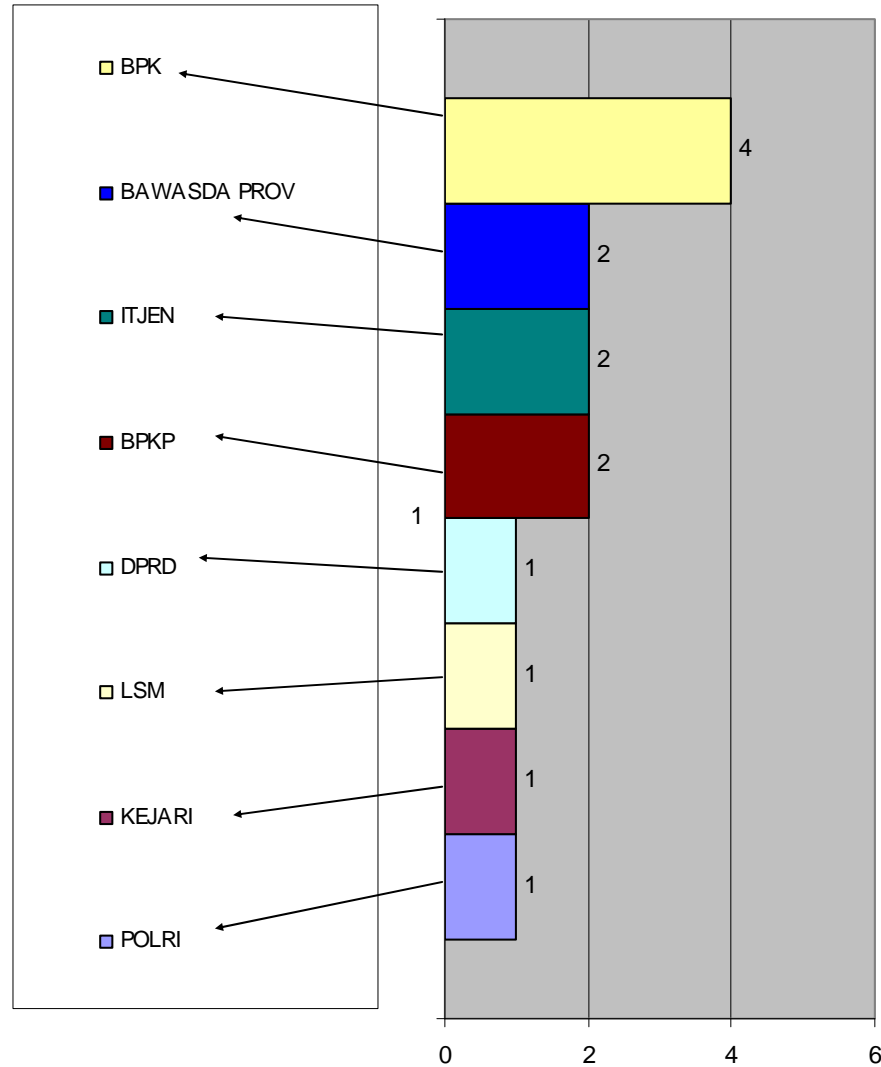
(N=278)

TUMPANG TINDIH PENGAWASAN

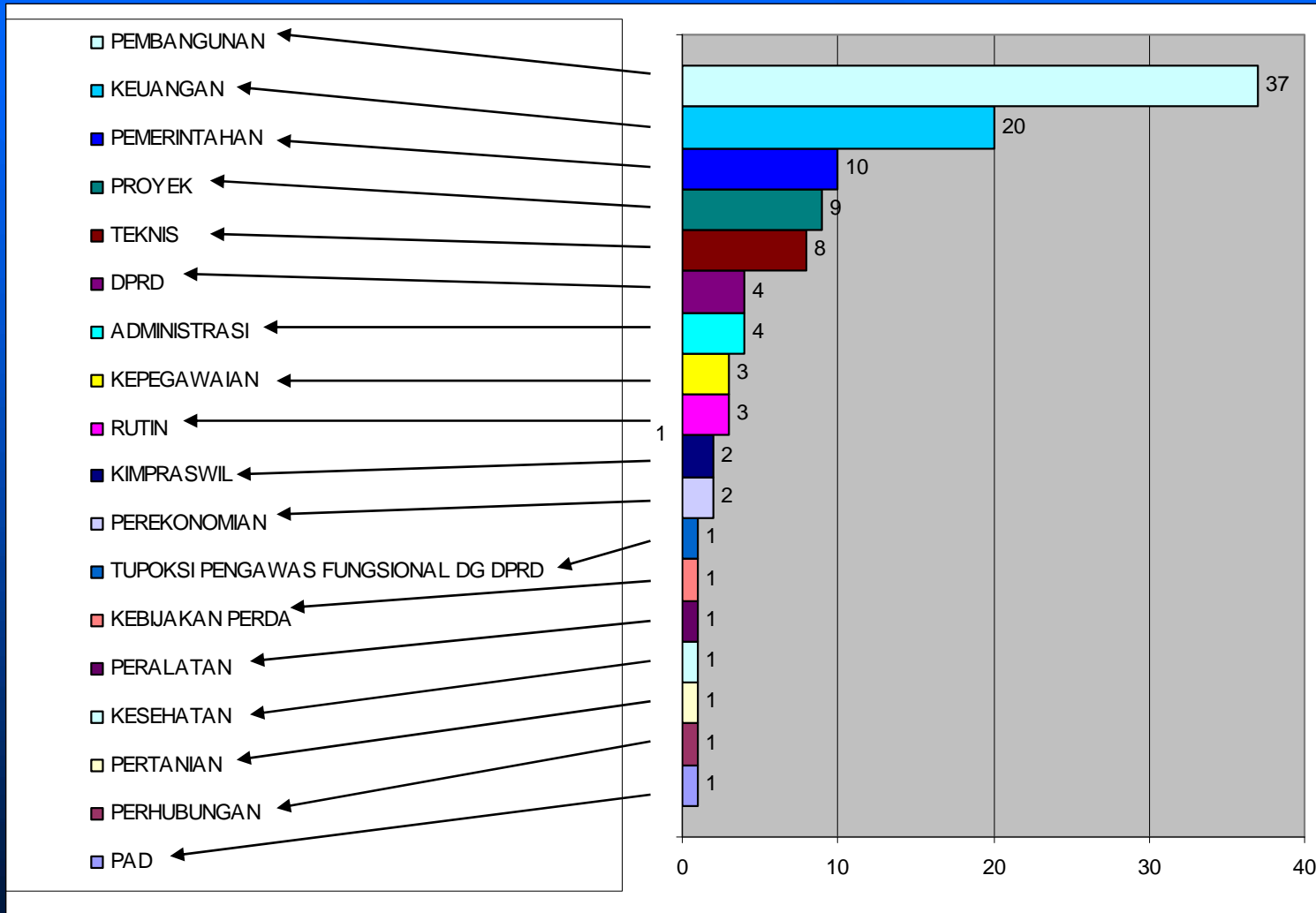
TUMPANG TINDIH	BPKP	ITJEN DEPDAGRI	BAWASDA PROV	BAWASDA KAB/KOTA
BPK	59	13	44	56
BPKP		13	51	55
ITJEN DEPDAGRI			7	9
BAWASDA PROV				57

N = 278

USULAN TAMBAHAN PENGAWAS EKSTERNAL



TUMPANG TINDIH PENGAWASAN DPRD DGN PENGAWASAN FUNGSIONAL



TERIMA KASIH

